



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

2024

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata tahun 2024. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata pada tahun 2024 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata pada tahun 2024.

Depok, 30 Januari 2025

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



Arie Wibowo Khurniawan

NIP 198012032005011004

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
DAFTAR GAMBAR	vi
Ikhtisar Eksekutif.....	vii
A. Realisasi Belanja.....	ix
B. Nilai Kinerja Anggaran.....	x
C. Permasalahan Umum.....	xi
D. Upaya Penyelesaian	xi
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	5
D. Isu-Isu Strategis.....	6
E. Peran Strategis.....	7
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
A. Visi	8
B. Misi	8
C. Tujuan Strategis	8
D. Matrix Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	9
E. Perjanjian Kinerja 2024 (Awal)	10
F. Perjanjian Kinerja 2024 (Revisi).....	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
1. Sasaran Kegiatan 1	13
2. Sasaran Kegiatan 2	37
B. Realisasi Anggaran	40
1. Capaian Anggaran	40
2. Catatan Penting DIPA.....	42
3. Efisiensi Anggaran	43
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	44
1. Inovasi.....	44

2. Penghargaan	45
3. Program Crosscutting/Collaborative	46
BAB IV Penutup.....	48

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024	vii
Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	ix
Tabel 3 Rekap Pegawai Per Tahun Per Jenis Golongan	2
Tabel 4 Tujuan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	8
Tabel 5 Sasaran dan Indikator Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	9
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024	10
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024	11
Tabel 8 Capaian Kinerja Organisasi	12
Tabel 9 Tabel Sasaran dan Realisasi PKP Tahun 2024	16
Tabel 10 Sasaran dan Realisasi PKP Refreshment Tahun 2024	16
Tabel 11 Pelaksanaan Reupskilling bagi Guru Kejuruan SMK Tahun 2024	18
Tabel 12 Pelaksanaan Reupskilling 5 Destinasi Wisata Superprioritas Tahun 2024	19
Tabel 13 Pelaksanaan Pelatihan Guru Bahasa Inggris Tahun 2024	20
Tabel 14 Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Kursus Tahun 2024	20
Tabel 15 Capaian Kinerja dan Anggaran IKK 1 Tahun 2024	21
Tabel 16 Perbandingan Realisasi IKK.1.2 Tahun Berjalan Dengan Target Jangka	24
Tabel 17 Perbandingan Realisasi IKK.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 18 Capaian Kinerja dan Anggaran IKK 1.2	26
Tabel 19 Perbandingan Realisasi IKK.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya ..	29
Tabel 20 Perbandingan Realisasi IKK.1.3 Tahun Berjalan Dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra	29
Tabel 21 Capaian Kinerja dan Anggaran IKK 1.3	32
Tabel 22 Capaian kinerja IKK 2.1 Predikat SAKIP BBPPMPV Bisnis Dan Pariwisata	35
Tabel 23 Penilaian IKPA Tahun 2024	39
Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	41

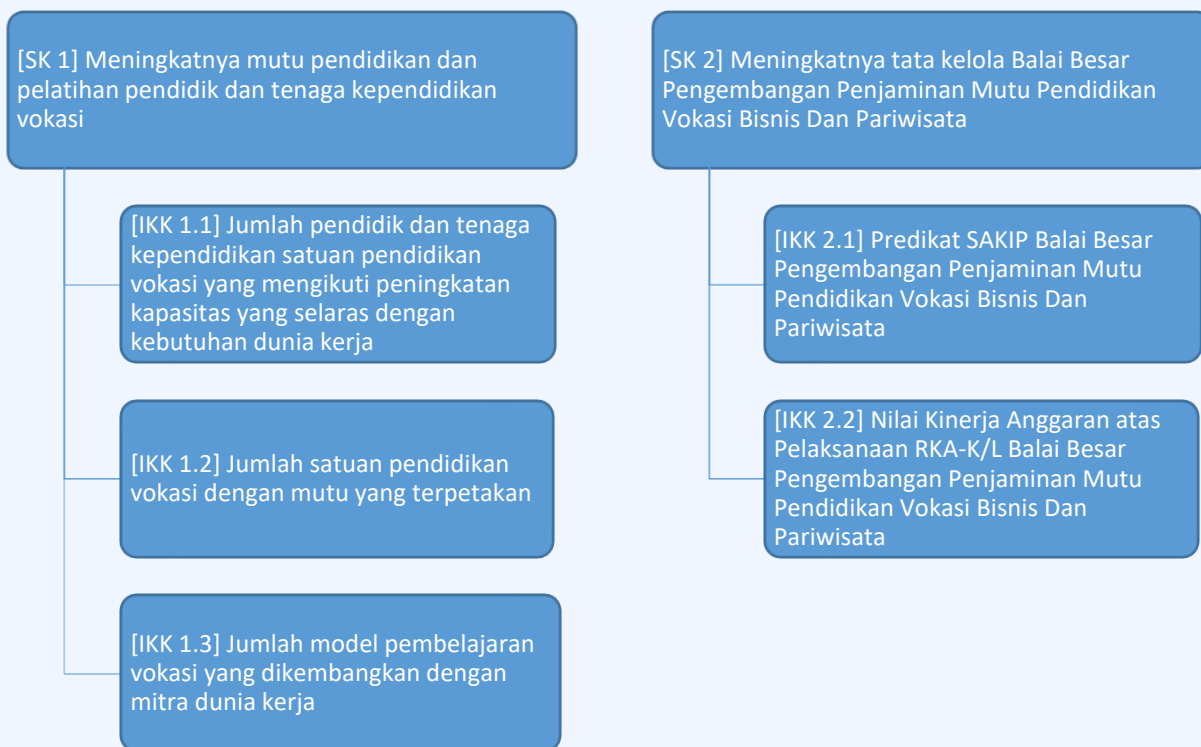
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024	ix
Gambar 2 Presentase Daya Serap Anggaran Tahun 2020 -2024	x
Gambar 3 Nilai Kinerja Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	x
Gambar 4 Daftar Pimpinan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.....	1
Gambar 5 Peraturan OTK BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.....	2
Gambar 6 Rekap Pegawai Per Tingkat Pendidikan	3
Gambar 7 Rekap Pegawai Per Jabatan.....	3
Gambar 8 Bidang Keahlian BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.....	5
Gambar 9 Struktur Organisasi.....	6
Gambar 10 Perbandingan Capaian IKK 1.1 Tahun 2020 sd 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024 .	15
Gambar 11 Provinsi Wilayah Pendampingan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2024 (6 Provinsi)	17
.....	17
Gambar 12 Pelaksanaan Magang Industri	18
Gambar 13 Grafik Perbandingan Target dan realisasi capaian output.....	30
Gambar 14 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	34
Gambar 15 Predikat SAKIP BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	36
Gambar 16 Nilai Kinerja Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2024	38
Gambar 17 Nilai IKPA Tahun 2021 – Tahun 2024.....	40
Gambar 18 Presentase Daya Serap.....	41
Gambar 19 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024.....	41
Gambar 20 Aplikasi Simpedik	44
Gambar 21 Aplikasi SiKepeg.....	45
Gambar 22 Penghargaan Duta Merdeka Belajar.....	45
Gambar 23 Penghargaan Pengelolaan Sinde Terbaik	46
Gambar 24 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	46

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata Tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024



Untuk keseluruhan target, baik dari Sasaran Kinerja 1 (satu) dan Sasaran Kinerja 2 (dua) berhasil dicapai sesuai target, bahkan ada 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang berhasil dicapai melebihi dari target yang ditentukan. Tingkat ketercapaian target BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN) Jakarta III berupa Laporan Capaian Output Bulan Desember 2024 yang diunggah melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja ini.

Berikut adalah tabel Target dan Capaian Masing-Masing Sasaran Kinerja Tahun 2024

[SK.1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

[IKK 1.1]	[IKK 1.2]	[IKK 1.3]
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja
Target : 4452 orang	Target : 1412 lembaga	Target : 4 kajian
Capaian : 4649 orang	Capaian : 1412 lembaga	Capaian : 4 kajian

[SK.2] Meningkatnya Tata Kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata



[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Target : A
Capaian : A



[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Target : 96.59
Capaian: 98.72

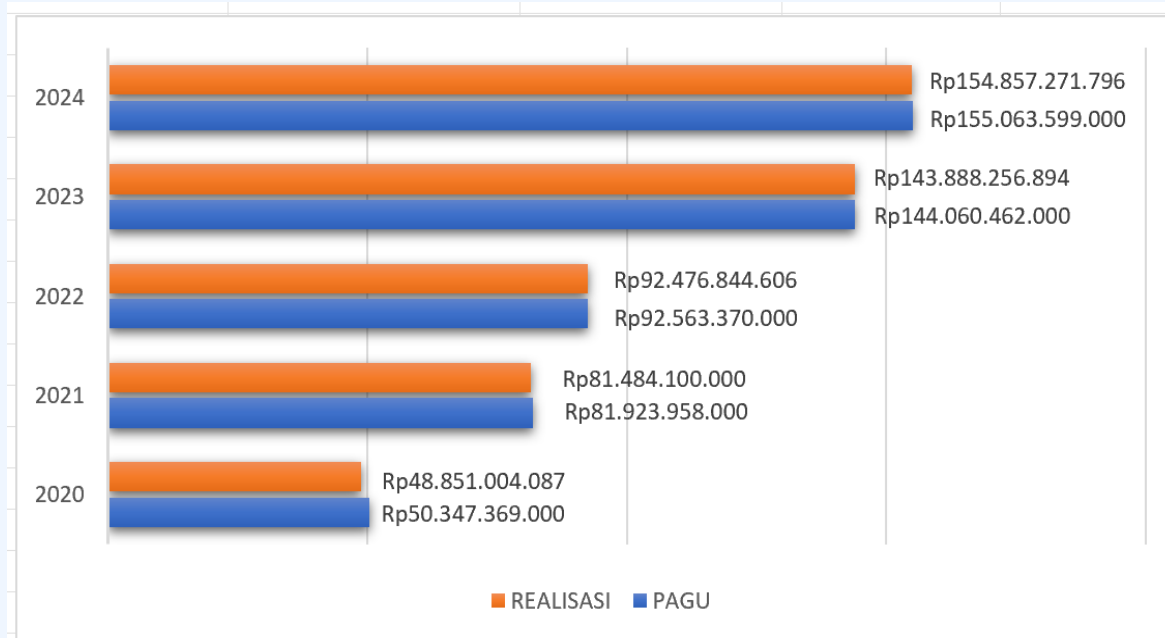
A. Realisasi Belanja

Pada Tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memiliki pagu anggaran sebesar Rp 155.063.599.000 dengan realisasi belanja negara mencapai Rp 154.857.271.796. Dengan kata lain, daya serap anggaran mencapai **99.87%** .

Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Awal	Blokir AA	Pagu Akhir	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp 24.413.708.000		Rp 24.413.708.000	Rp 24.293.619.694
Belanja Barang	Rp 119.977.252.000	Rp 1.998.949.000	Rp 117.978.303.000	Rp 119.907.378.276
Belanja Modal	Rp 12.671.588.000		Rp 12.671.588.000	Rp 12.655.222.826
Total	Rp 157.062.548.000		Rp 155.063.599.000	Rp 154.857.271.796

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah anggaran yang diterima oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata untuk dikelola selalu mengalami peningkatan. Berikut adalah datanya :



Gambar 1 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024

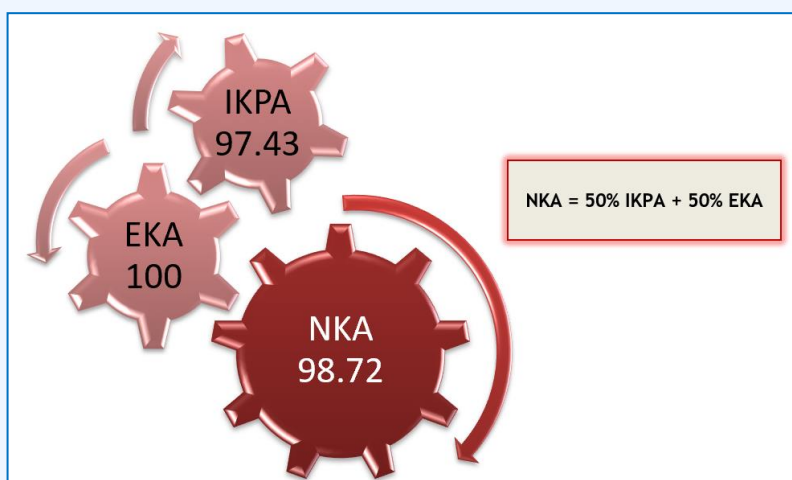
Dengan jumlah pagu anggaran yang terus bertambah, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tetap berhasil menjaga mutu pengelolaan anggaran dengan ketercapaian daya serap anggaran yang maksimal.



Gambar 2 Presentase Daya Serap Anggaran Tahun 2020 -2024

B. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil perhitungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot nilai 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%. NKA digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAK/L). Nilai Kinerja Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Nilai Kinerja Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

C. Permasalahan Umum

Pada dasarnya, kendala yang terjadi dalam pengelolaan anggaran pada Tahun 2024 cukup banyak dan bervariasi. Namun secara umum kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Adanya blokir Automatic Adjustment (AA) yang menyebabkan kegiatan pada IKK.1 berupa Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri tertunda. Hal ini menyebabkan ditundanya kegiatan pelatihan yang berdampak pada tidak terserapnya anggaran sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) menjadi tidak sesuai target. Ketidaktercapaian RPD menyebabkan nilai deviasi yang tinggi pada variabel Deviasi Hal III DIPA yang sangat mempengaruhi nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) satker.
2. Terbitnya surat nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 Menteri Keuangan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas di penghujung tahun yang membuat satker harus melakukan perubahan mendadak secara masif baik dari sisi struktur kegiatan dan juga jumlah anggaran. Di sisi lain, satker juga diuntut untuk melakukan percepatan daya serap anggaran untuk memenuhi target yang sudah ditentukan.

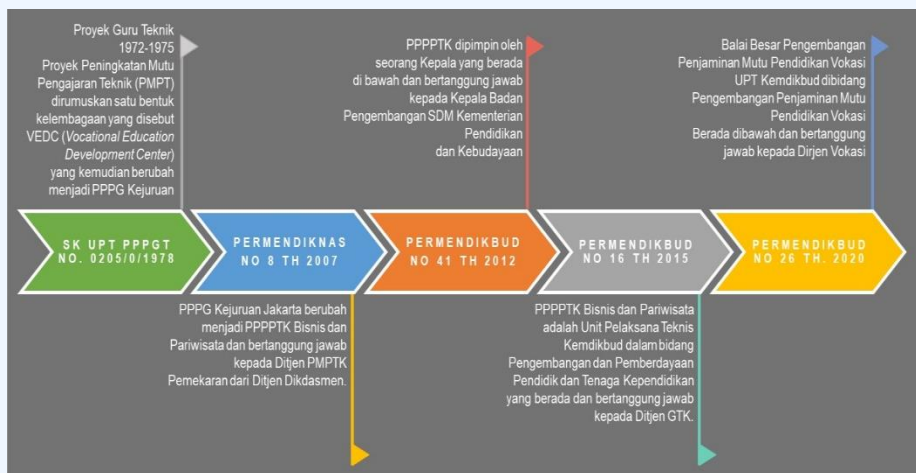
D. Upaya Penyelesaian

- Memperkuat bukti dukung buka blokir AA dengan melakukan koordinasi secara terus menerus bersama Eselon 1 dan kanwil DJA. Satker juga melakukan penyesuaian Hal III DIPA untuk melakukan perbaikan nilai pada Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) secara maksimal.
- Melakukan analisa secara rinci dan menyeluruh untuk memilih kegiatan mana saja yang bisa dilakukan penghematan anggaran dan memastikan kegiatan yang merupakan program Prioritas Nasional tetap berjalan

BAB I Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dibawah Ditjen Pendidikan Vokasi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) Berikut sejarah perjalanan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sejak Tahun 1978 sampai dengan sekarang :



Gambar 4 Sejarah Singkat BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



Gambar 5 Daftar Pimpinan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

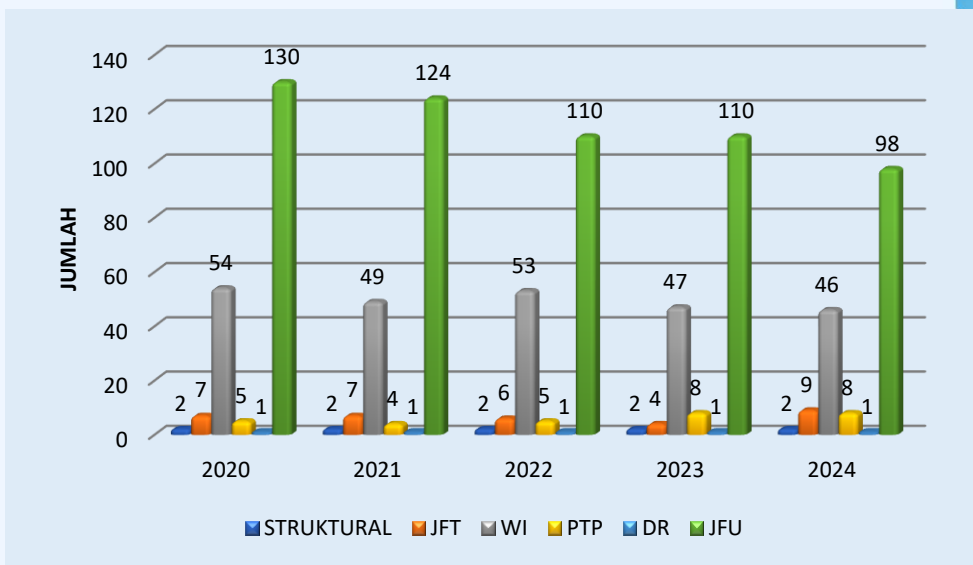


Gambar 6 Peraturan OTK BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

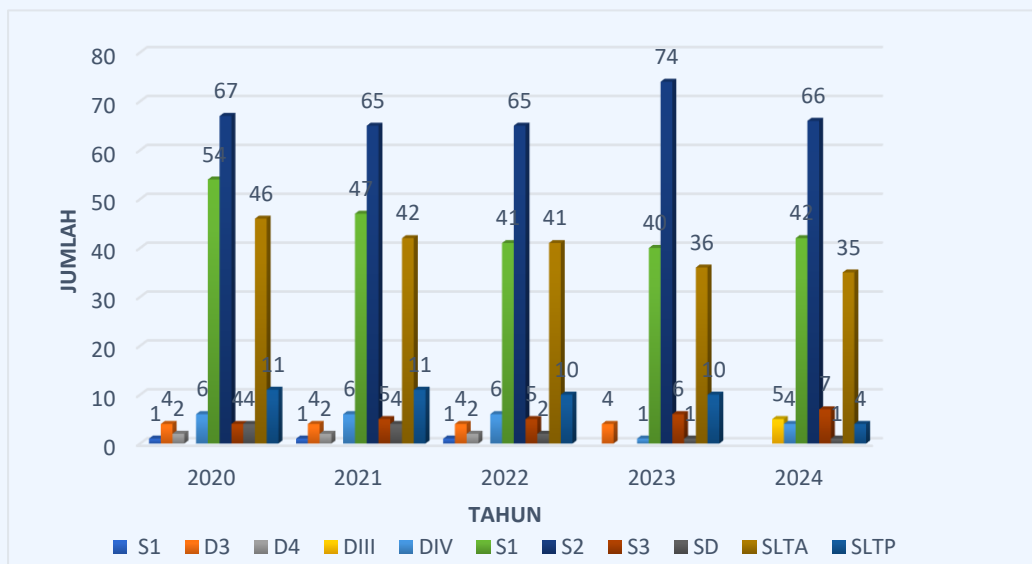
BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah unit organisasi setingkat eselon II, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen Pendidikan Vokasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata didukung oleh 164 orang pegawai PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 Rekap Pegawai Per Tahun Per Jenis Golongan

	2020	2021	2022	2023	2024
Juru				1	1
Juru Muda Tk.I	4	4	2		
Juru Tk.I	8	8	8		
Pembina	21	23	24	26	32
Pembina Tk. I	12	10	8	6	
Pembina Utama Madya	2	2	2	1	1
Pembina Utama Muda	2	3	4	7	6
Penata	21	15	14	17	21
Penata	11	10	8	4	
Penata Muda	15	13	15	10	13
Penata Muda Tk. I	42	41	38	34	
Penata Tk. I	41	41	39	48	
Pengatur	2	3	2	8	8
Pengatur Muda				8	7
Pengatur Muda Tk. I	7	7	7		
Pengatur Tk. I	11	7	6	2	
Pembina Tingkat I					4
Penata Tingkat I					43
Penata Muda Tingkat I					28



Gambar 5 Rekap Pegawai Per Jabatan



Gambar 4 Rekap Pegawai Per Tingkat Pendidikan

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berkedudukan di Kota Depok Jawa Barat dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya Bidang Bisnis dan Pariwisata yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B.Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya sedangkan fungsinya adalah :

1. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
2. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
5. pengelolaan data dan informasi;
6. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi ;
7. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi. (Pasal 11)



Gambar 6 Bidang Keahlian BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



Gambar 7 Struktur Organisasi

D.Isu-Isu Strategis

Paradigma Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentu mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya keterlibatan aktif dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tinggi

Pendidikan Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri.

Saat ini paradigma tersebut telah bergeser dengan dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu seorang peserta didik baik di SMK/Kursus/Pelatihan mengikuti proses pembelajaran (pola pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kompetensi SDM (Guru/Instruktur) harus mengikuti kebutuhan dunia industri, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang relevan.

Kebijakan Pendidikan Vokasi.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofis Pendidikan Vokasi mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi strategi implementasi revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan Pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi, beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

E. Peran Strategis

1. Berperan dalam pengembangan, fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
2. Berperan dalam pengembangan dan pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. Berperan dalam penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. Berperan dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi peserta didik baik di SMK/Kursus/Pelatihan sesuai bidang;

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Visi

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sebagai salah satu UPT dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (tahun 2020) serta UPT pada Ditjen Pendidikan Vokasi (tahun 2021 – 2024) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendukung sepenuhnya visi dan misi Kemendikbud 2020 – 2024, yaitu

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri bernalar kritis dan kreatif”

B. Misi

“Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.”

C. Tujuan Strategis

Untuk merealisasikan visi dan misi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dan berpedoman pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, maka BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2024 menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 4 Tujuan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

KODE	TUJUAN BBPPMPV BISPAR
T1	Pelaksanaan Penjaminan mutu pendidikan vokasi melalui pembinaan, bimbingan, pendampingan, supervisi, dan konsultasi langsung pada SMK Bispar (T 1)
T2	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bispar yang berkualitas dan berstandar industri melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi (T 2)
T3	Pelaksanaan Kerjasama di bidang Pengembangan Model Pendidikan Vokasi (SMK) Bispar dan Pelaksanaan Penyelarasan Pendidikan Vokasi dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (T 3)
T4	Peningkatan sistem tata Kelola tata kelola satuan kerja dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik (TS 4)

D.Matrix Kinerja BBPMPV Bisnis dan Pariwisata

Untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata menetapkan 2 sasaran kegiatan (SK) dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam Renstra BBPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2020 – 2024. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 5 Sasaran dan Indikator Kinerja BBPMPV Bisnis dan Pariwisata

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Satuan	Target Renstra					
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.	Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi						
IKK 1.1	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	-	-	3020	3454	4452
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	-	-	811	811	1412
IKK 1.3.	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	-	-	2	2	4
SK. 2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata						
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	-	-	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	-	-	93.50	94	94

Tahun 2020 dan 2021 memiliki perbedaan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dengan tahun 2022, 2023 dan 2024. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan terdapat peningkatan target setiap tahunnya.

E. Perjanjian Kinerja 2024 (Awal)

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata periode 2020 – 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2024, dan dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452
		[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412
		[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	4
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Mutu Pendidikan Vokasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	96,59

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 46.401.098.000,-
2	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 110.535.474.000,-
		TOTAL	Rp. 156.936.572.000,-

Perjanjian Kinerja awal ditandatangani tanggal 16 Februari 2024. Ada perubahan anggaran pada tahun 2024 terkait pengurangan anggaran terkait kebijakan pemotongan perjalanan dinas (*Self Blocking*), Pengurangan Belanja Pegawai dikarenakan ada kelebihan permintaan

dari *Sesditjen Vokasi* untuk satker yang kekurangan *Belanja Pegawai*, penambahan target *PNBP* dan penambahan pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi. Namun tidak ada perubahan target pada Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja dan alokasi anggaran dan telah ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2024.

F. Perjanjian Kinerja 2024 (Revisi)

Berkaitan dengan adanya perubahan anggaran sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452
		[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412
		[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	4
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Mutu Pendidikan Vokasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	96,59
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 45.701.098.000,-
2	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 111.651.450.000,-
		TOTAL	Rp. 157.352.548.000,-

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan :

Tabel 8 Capaian Kinerja Organisasi

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	%
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452	4649	104%
		[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412	1412	100
		[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	4	4	100
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Mutu Pendidikan Vokasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A	A	100
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	96,59	98.72	102%

Secara umum, realisasi dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) pada Tahun 2024 tercapai 100%, bahkan ada 2 indikator kinerja yang realisasinya mencapai lebih dari 100% , ketercapaian sasaran diatas target yang ditentukan tersebut bukan merupakan nilai anomali karena masih masuk dalam batas kewajaran. Hal ini disetujui oleh KPPN Jakarta III selaku KPPN yang menaungi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sebagai salah satu satker

binaannya. Persetujuan didasarkan kepada Laporan Realisasi Kinerja satker Bulan Desember 2024 yang dikirimkan melalui aplikasi SAKTI dan telah di tampilkan penilaiannya di <https://spanint.kemenkeu.go.id>

1. Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 berupa meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 3 Indikator tersebut, terdapat 2 indikator yang realisasinya sesuai dengan target, dan ada 1 indikator yang realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut akan dijelaskan pada masing-masing indikator :

[1.1]

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Definisi Operasional :

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi adalah program peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan berfokus pada keahlian yang diajarkan di satuan pendidikan vokasi. Peserta program peningkatan kapasitas adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari satuan pendidikan vokasi baik negeri maupun swasta

Lingkup pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas:

1. Pendidik satuan pendidikan vokasi adalah guru SMK, Dosen PTV, dan Instruktur Kursus dan Pelatihan; dan
2. Tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi adalah Pimpinan PTV, Kepala Sekolah, Pengelola LKP, pengawas, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP).

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas pelatihan Upskilling dan Reskilling.

1. Pelatihan Upskilling adalah pelatihan berbasis industri bagi adalah pendidik dan

tenaga kependidikan yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.

2. Pelatihan Reskilling adalah pelatihan berbasis industri bagi adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.

Program peningkatan kapasitas tersebut dilakukan oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerja sama dengan Dunia Kerja dan/atau Lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas tersebut mengacu pada juknis atau perdirjen terkait.

Metode Perhitungan :

$$I = A + B + C$$

Keterangan:

I = Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas dan penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja

A = Guru yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja sejumlah 1095 orang.

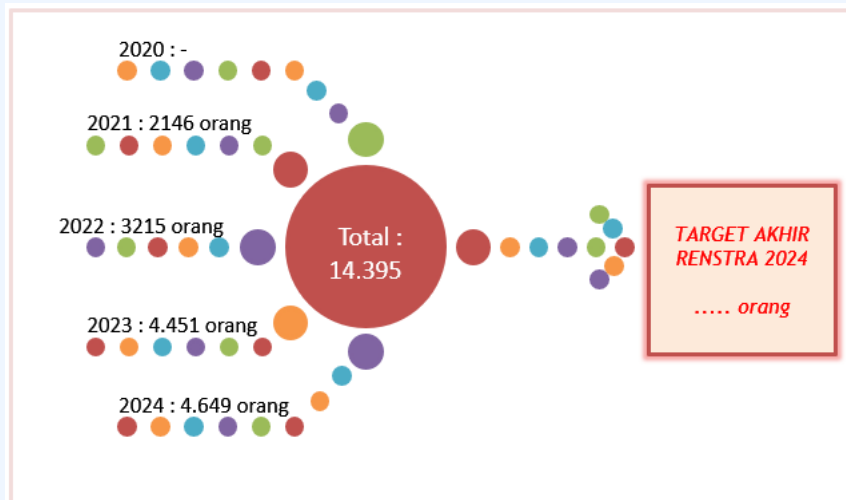
B = Guru, Kepala Sekolah, pengawas, teknisi, laboran, instruktur dan tenaga administrasi lainnya yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri sejumlah 3504 orang

C = Instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan sejumlah 50 orang.

Sehingga :

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas dan penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja adalah 4649 orang dengan rincian = 1095 orang + 3504 orang + 50 orang .

Hal ini menunjukkan bahwa capaian IKK 1.1. mencapai 102% dari target yang ditentukan



Gambar 8 Perbandingan Capaian IKK 1.1 Tahun 2020 sd 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024

Capaian tahun 2020 tidak bisa diakumulasi dengan pencapaian Tahun 2022 sampai Tahun 2024 dikarenakan target IKK yang berbeda.

Kegiatan Pendukung

Tercapainya IKK 1.1 jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja di angka 104%. Ketercapaian didukung oleh 3 kegiatan berikut :

1. Guru Kejuruan yang Mendapatkan Pelatihan Kurikulum Yang Diselaraskan Dengan Kebutuhan Dunia Kerja.

Dalam rangka menyeleraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, maka, dilakukanlah kegiatan berupa Pendampingan Implementasi Pembelajaran (PIP). Pendampingan Implementasi Pembelajaran (PIP) pada Program SMK Pusat Keunggulan merupakan program dukungan teknis dalam pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di SMK Pusat Keunggulan.

Output yang dihasilkan :

- a. Rencana Tindak Lanjut dari Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun 2024 tiap-tiap provinsi dengan rincian nama kegiatan, waktu, siap yang terlibat dan target dari Seri Webinar dan Komunitas Belajar

b. Terkumpulnya Data Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka tiap-tiap provinsi, antara lain:

- Data SMK Pusat Keunggulan
- Data Guru SMK sebagai Guru Penggerak
- Data Komunitas Belajar Jenjang SMK
- Data Mitra Pembangunan Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMK

Jenis Kegiatan Pendampingan Implementasi Pembelajaran (PIP) :

a. Pelatihan Komite Pembelajaran (PKP) :

Pelatihan Komite Pembelajaran (PKP) pada program SMK Pusat Keunggulan merupakan pelatihan yang didesain untuk menyiapkan komite pembelajaran pada setiap satuan pendidikan pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, agar mampu dan siap melakukan perubahan penyelenggaraan pembelajaran di sekolah masing-masing. Adapun sasarannya adalah 75 SMK PK (tahun 2023 & 2024), dan masing-masing SMK terdiri dari 7 orang, yaitu: Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, dan Guru (2 guru kejuruan, 1 guru umum, dan 1 guru BK).

Tabel 9 Tabel Sasaran dan Realisasi PKP Tahun 2024

Periode	Sasaran	Realisasi	Kelas	Keterangan
19 s.d. 30 Agustus 2024	133	130	5	Moda Daring
26 s.d. 6 September 2024	101	100	4	Moda Daring

b. PKP Refreshment

Pelatihan Komite Pembelajaran (PKP) pada program SMK Pusat Keunggulan Tahun 2021 s.d. 2022 sebagai Upaya penyegaran terkait PKP dengan peserta 5 orang dari masing-masing SMK PK, yaitu: Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, dan Guru (2 guru kejuruan, dan 2 guru umum)

Tabel 10 Sasaran dan Realisasi PKP Refreshment Tahun 2024

Periode	Sasaran	Realisasi	Kelas	Keterangan
19 Agustus s.d. 20 September 2024	865	865	29	Moda Daring



Gambar 9 Provinsi Wilayah Pendampingan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2024 (6 Provinsi)

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang Mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri

Pelatihan upskilling dan Reskilling merupakan proses pemberian penyegaran dan memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap guru-guru SMK bidang Bisnis dan Pariwisata, agar guru-guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang berlaku di dunia usaha dan dunia industri.

Pelaksanaan Reupskilling terbagi menjadi beberapa program kegiatan. Berikut adalah rinciannya :

- a. Pelatihan Upskilling dan Reskilling bagi Guru Kejuruan SMK bidang Bisnis dan Pariwisata.

Peserta dalam pelatihan ini melibatkan Guru Kejuruan SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata di seluruh wilayah Indonesia. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata juga menggandeng Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk ikut terlibat dalam pelatihan ini. Adapun Industri yang bekerjasama dalam pelatihan Upskilling dan Reskilling merupakan Industri yang merupakan rekanan dari SMK yang terpilih menjadi Pusat Belajar.

Tabel 11 Pelaksanaan Reupskilling bagi Guru Kejuruan SMK Tahun 2024

Angkatan	Tanggal	Sasaran	Realisasi
Angkatan I	25 Maret s.d. 17 Mei	640	629
Angkatan II	29 April s.d. 21 Juni	640	631
Angkatan III	29 Mei s.d. 7 Juli	640	626
Angkatan IV	26 Juni s.d. 14 Agustus	600	592
Angkatan V	17 September s.d. 23 Oktober	580	566
Angkatan VI	18 November s.d. 30 November	60	60

Ketidaktercapaian jumlah peserta dalam setiap angkatan banyak didominasi oleh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengadakan pelaksanaan reupskilling Angkatan VI namun dengan metode yang berbeda. Hal tersebut merupakan strategi yang diambil di tengah waktu yang terbatas.



Gambar 10 Pelaksanaan Magang Industri

- b. Pelatihan Upskilling dan Reskilling Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata pada 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pelatihan Upskilling dan Reskilling Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata pada 5 Destinasi Wisata Superprioritas adalah pelatihan bidang kuliner bagi guru-guru kuliner SMK yang berada di 5 wilayah destinasi superprioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Tahun 2024 sebagai pusat pengembangan wisata superprioritas.

Tabel 12 Pelaksanaan Reupskilling 5 Destinasi Wisata Superprioritas Tahun 2024

Angkatan	Tanggal	Sasaran	Realisasi
Angkatan I	01 s.d. 7 Desember 2024	60	48
Angkatan II	08 s.d. 14 Desember 2024	52	52

- c. Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK berbasis Industri
- Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK berbasis Industri adalah program bagi Kepala Sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolahnya baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika DUDIKA. Pelatihan ini berhasil melatih sebanyak 136 Kepala Sekolah.
- d. Program Peningkatan Kapabilitas Pengawas SMK
- Program Peningkatan Kapabilitas Pengawas SMK adalah program bagi Pengawas Sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan terhadap sekolah binaan baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika DUDIKA. Pelatihan ini berhasil melatih sebanyak 60 Pengawas SMK.
- e. Pelatihan Guru Bahasa Inggris Berbasis Industri
- Pelatihan Guru Bahasa Inggris berbasis Industri adalah salah satu program BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam rangka meningkatkan kompetensi guru

SMK yang mengajar Bahasa Inggris.

Nama Pelatihan	Periode	Sasaran	Realisasi
Pelatihan Guru Bahasa Inggris Berbasis Industri	19 sd 25 Februari	44	44

Tabel 13 Pelaksanaan Pelatihan Guru Bahasa Inggris Tahun 2024

f. Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak

NBP merupakan pendapatan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak. PNBPN merupakan salah satu sumber dana utama untuk APBN. PNBPN dikelola dalam sistem APBN dan langsung disetor ke kas negara.

3. Instruktur Kursus yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Industri Bidang Keahlian Teknologi Terapan

Pelatihan Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan intervensi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata untuk meningkatkan kompetensi instruktur LKP, agar para instruktur tersebut dapat beradaptasi dan mampu mengakomodasi perubahan-perubahan kontekstual yang terjadi di dunia kerja terkini.

Tabel 14 Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Kursus Tahun 2024

Nama Pelatihan	Periode	Sasaran	Realisasi
Pelatihan Instruktur LKP Bidang Keahlian Akuntansi Pajak	3 sd 9 Maret 2024	25	25
Pelatihan Instruktur LKP Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit/Spa	3 sd 9 Maret 2024	25	25

Tabel 15 Capaian Kinerja dan Anggaran IKK 1 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2024			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452	4649	104%	Rp88.517.992.000	Rp87.563.445.949	99%

Pada Tabel 15, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 1.1. dengan hasil yang melebihi target, sebesar 104% dan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan mampu menyerap anggaran sebesar 99% .

Faktor Keberhasilan Capaian :

- a) Adanya kecermatan dalam pelaksanaan pelatihan dan perubahan kebijakan dengan merubah rencana penjadwalan dan pola pembelajaran dari diklat tatap muka menjadi diklat daring dan diklat blended.
- b) Adanya Panduan Pelatihan dan Implementasi Pembelajaran pada SMK Pusat Keunggulan.
- c) Berkerjasama dengan SMK PK sebagai Pusat Belajar (PB) dengan menunjuk Industri Mitra dan Pelaksanaan kegiatan Magang Industri di lokasi (SMK) memungkinkan untuk menghadirkan peserta lebih banyak sehingga capaian target dapat tercapai.
- d) Berkoordinasi dengan Unit terkait dalam merevisi anggaran untuk mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal

Kendala / Permasalahan :

- a) Jaringan internet di wilayah kalimantan agak sulit;
- b) Transportasi lokal Sekolah di wilayah Kalimantan yang terbatas;
- c) Revisi anggaran;

- d) Menyesuaikan LMS prioritas dengan Kurikulum Merdeka;
- e) Pengunduran diri bermacam-macam seperti : Mengikuti Ujian PPG, tidak menuntaskan pembelajaran daring, mengikuti suami pindah tugas, hamil, sakit, baru selesai operasi usus buntu, orang tua sakit, menemani anak ujian;
- f) Sebagian SMK masih perlu bantuan, bimbingan dan pendampingan dalam rangkaian implementasi kurikulum merdeka;
- g) Kegiatan SMK-PK dalam pemenuhan ToC banyak melibatkan narasumber dari Balai Besar, sehingga kegiatan banyak beririsan dengan kegiatan pendampingan PIP.
- h) Ada kegiatan pendampingan PBD (rapor Pendidikan) yang bersamaan pelaksanaannya dengan PIP;
- i) Kegiatan SMK-PK dalam pemenuhan ToC banyak melibatkan narasumber dari Balai Besar, sehingga kegiatan banyak beririsan dengan kegiatan pendampingan PIP

Tindak Lanjut :

- a) Berkoordinasi dengan Disdikprov mengenai sekolah sasaran yang dapat didampingi secara luring dan terjangkau aksesnya;
- b) Melakukan revisi POK sesuai tuntutan dan kebutuhan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Mencarijaringan yang memadai dan menunggu listrik menyala
- d) Terkait dengan penambahan sasaran akibat perubahan kebijakan dengan melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pendampingan secara luring dan daring;
- e) Dibuatkan penggantian peserta dari data cadangan, untuk kemudian diterbitkan surat panggilan peserta pengganti;
- f) Peserta pengganti untuk magang industri diambil dari 5 besar peserta terbaik diklat Smart Training Bispar tahun sebelumnya;
- g) Seleksi permintaan narasumber kegiatan SMK-PK agar PIP lebih dulu

menyelesaikan pendampingannya baik daring maupun luring.

Strategi :

- a) Berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke Sekolah di wilayahnya;
- b) Menyediakan peserta Cadangan dan membuat pakta integritas bagi peserta reskilling dan upskilling terkait kesanggupan mengikuti diklat;
- c) Menyediakan Narasumber kegiatan SMK PK sesuai kuota pendampingan,
- d) Berkoordinasi dengan unit utama untuk melakukan revisi anggaran baik lewat DJA dan Kanwil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[1.2]

Jumlah Satuan Pendidikan Vokasi dengan Mutu yang Terpetakan

Pada IKK ini kegiatan yang mendukung adalah kegiatan perencanaan berbasis data (PBD). Strategi pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pendampingan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dilakukan secara luring (tatap muka) dengan menggunakan pendekatan pembelajaran konstruktivisme dan andragogi, dengan metoda ceramah, diskusi, penugasan.
- b) Penjaminan Mutu Perencanaan Berbasis Data (PBD) dilakukan secara luring

Pendampingan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dilakukan di SMK wilayah binaan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata (OKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara) sejumlah 200 (dua ratus lembaga) satuan pendidikan periode bulan September s.d. November 2024.

Penjaminan Mutu Perencanaan Berbasis Data (PBD) tahun 2024 dilakukan di wilayah binaan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yaitu Provinsi OKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara) dengan jumlah sasaran 100 (seratus) satuan pendidikan periode bulan November s.d. Desember 2024.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi IKK.1.2 Tahun Berjalan Dengan Target Jangka

INDIKATOR KINERJA Kegiatan	2024			Akhir Renstra s.d 2024	
	Target	Real	%		
Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412	1412	100	2718	52%

Tabel 17 Perbandingan Realisasi IKK.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA Kegiatan	2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%
Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811	1225	151	1412	1412	100

Definisi Operasionalnya adalah sebagai berikut

Program	: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SK	: Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Vokasi
IKK	: 2.6.4.3. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan
Definisi:	

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

Lingkup satuan pendidikan vokasi yang akan dipetakan mutunya adalah SMK dan LKP (bidang vokasional).

LKP bidang vokasional adalah LKP yang menyiapkan peserta didiknya menguasai ketrampilan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Mutu Pendidikan Vokasi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya), Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan, dan peraturan serta kebijakan terkait (Link and Match/Keterlibatan dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi

8 + i):

1. Kurikulum disusun Bersama, termasuk penguatan aspek softskills dan karakter kekerjaan untuk melengkapi aspek hardskills yang sesuai kebutuhan dunia kerja;
2. Pembelajaran berbasis project riil dari dunia kerja (PBL), untuk memastikan hardskills akan disertai softski/1s dan karakter yang kuat;
3. Jumlah dan peran guru/dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program studi/program keahlian);
4. Magang atau Praktik Kerja di dunia kerja minimal 1 semester;
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan guru/dosen/instruktur);
6. Guru/Dosen/instruktur secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja;
7. Riset terapan mendukung teaching factory/ teaching industry yang bermula dari kasus atau kebutuhan;
8. Komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja;
9. Berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja, antara lain:
10. Beasiswa dan/atau ikatan dinas;
11. Donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk lainnya;
12. Dan lain sebagainya.

Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi.

Tujuan pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan vokasi.

Metode Penghitungan:

$$I = A + B$$

Keterangan:

I = Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

A = jumlah SMK dengan mutu yang terpetakan

B = jumlah LKP(bidang vokasional) dengan mutu yang terpetakan

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai Besar Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

$$1412 = 1412 + 0$$

Tabel 18 Capaian Kinerja dan Anggaran IKK 1.2

INDIKATOR KINERJA Kegiatan	2024			Akhir Renstra s.d		Anggaran		
	Target	Real	%	2024		Alokasi	Realisasi	%
Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412	1412	100	2718	52%	8,479,176,000	8,479,156,000	100

Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 1.2. dengan hasil yang sesuai target, sebesar 100 % atau 1412 Lembaga dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 1412 Lembaga . Capaian kinerja IKK 1.2. berkontribusi sebesar 52 % pada pencapaian target Renstra (2024). Sedangkan untuk serapan anggaran hampir 100% atau Rp. 8,479,156,000,- yang terserap dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8,479,176,000,-.

Faktor Keberhasilan capaian ini didukung oleh:

Kerberhasilan didukung oleh adanya ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana penjadwalan yang sudah ditetapkan sebelumnya antara lain:

1. Sosialisasi dari Pusat mengenai Rapor Pendidikan bagi Satuan Pendidikan dan
2. Pemerintah Daerah versi 2.0 secara daring;
3. Update refreshment materi PBD kepada Tim PBD Bispar, secara daring;
4. Rapat Koordinasi PBD bagi SMK yang diikuti oleh instansi Dinas Pendidikan Provinsi (Kabid SMK, Operator Markas, Koord Pengawas dan MKKS), BAPPEDA dan BPKAD serta BPMP dan BGP di 6 wilayah Binaan BBPPMPV Bispar yakni Prov DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, Prov Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan Prov Kalimantan Utara ;
5. Sosialisasi PBD bagi Satpen yang diikuti oleh seluruh SMK di 6 Wilayah Binaan;
6. 5.Pendampingan PBD bagi Dinas Pendidikan Provinsi di Prov DKI Jakarta, Kaltim,Kalsel,Kalbar, Kalteng dan Kaltara yang diikuti oleh Kepala Dinas, Kabid Perencanaan, Kabid Sarpras, Kabid SMK dan Operator Markas;
7. Pendampingan PBD secara Daring menggunakan LMS untuk seluruh SMK di 6 wilayah binaan BBPPMPV Bispar sebanyak 1.225 SMK yang diikuti oleh Kepsek, Wakakur,Operator Arkas dan Guru yang memiliki Akun Belajar.id

Kendala / Permasalahan :

1. Belum adanya Juknis PBD dari Pusat,masih dalam proses penyusun;
2. Refreshment materi melalui daring, Tim PBD tidak focus dalam menerima materi,dikarenakan ada kegiatan di waktu yang bersamaan;
3. Peserta yang mengikuti sosialisasi secara daring, tidak fokus dalam menerima materi;
4. Beberapa Satuan Pendidikan tidak memiliki akun Belajar.id;
5. Satuan Pendidikan khususnya swasta kurang motivasi dalam menggunakan rapor Pendidikan;

6. Ada beberapa sekolah yang belum ada nilai rapornya karena tidak mengikuti asesmen nasional;
7. Pendampingan untuk wilayah Kalimantan memiliki akses internet yang kurang memadai;
8. Pendampingan ke dinas provinsi kurang maksimal karena kesibukan, sehingga pengambil keputusan mewakili stafnya;
9. Satuan Pendidikan yang didampingi secara luring masih perlu pendampingan berkelanjutan mengenai PBD;
10. Jarak tempuh lokasi sasaran sekolah transportasi yang terbatas khususnya di wilayah Kalimantan, mengakibatkan adanya tambahan hari dalam perjalanan dinas;
11. Sekolah yang menjadi sasaran program Kampanye Sekolah Sehat, masih banyak yang perlu diadvokasi ataupun didampingi dalam pelaksanaan program sekolah sehat karena masih kurang sesuai dengan kondisi ideal.

Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan Direktorat SMK terkait kegiatan pendukung dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data;
2. Dilaksanakan Training of Trainer bagi Tim Pendampingan secara luring;
3. Peserta dan Satuan Pendidikannya diprioritaskan dalam pendampingan secara luring;
4. Meminta Satuan Pendidikan untuk mendaftar akun belajar.id;
5. Sekolah yang belum ada nilai rapor, tetap aktif dalam pendampingan daring untuk menambah pengetahuan terkait rapor Pendidikan;
6. Perlu adanya koordinasi berkelanjutan dengan dinas pendidikan provinsi;
7. Perlu adanya pendampingan luring yang berkelanjutan, tidak hanya sekali;
8. Memastikan terlebih dahulu ke Satuan Pendidikan perihal jarak dan transportasi, sebelum keberangkatan;
9. Dievaluasi kembali hasil asesmen sekolah yang ditunjuk dalam program kampanye

sekolah sehat. Sehingga sekolah yang ditunjuk sudah memiliki kondisi ideal dalam program sekolah sehat.

Strategi :

1. Berkoordinasi dengan Direktorat SMK terkait kegiatan pendukung dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data;
2. Sosialisasi nilai rapor Pendidikan ke satuan Pendidikan;
3. Sosialisasi program sekolah sehat;
4. Pemetaan kuota tim pendampingan untuk TOT sesuai kebutuhan;
5. Memotivasi Satpen mengenai pentingnya PBD dan Rapor Pendidik.

[1.3]

Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja.

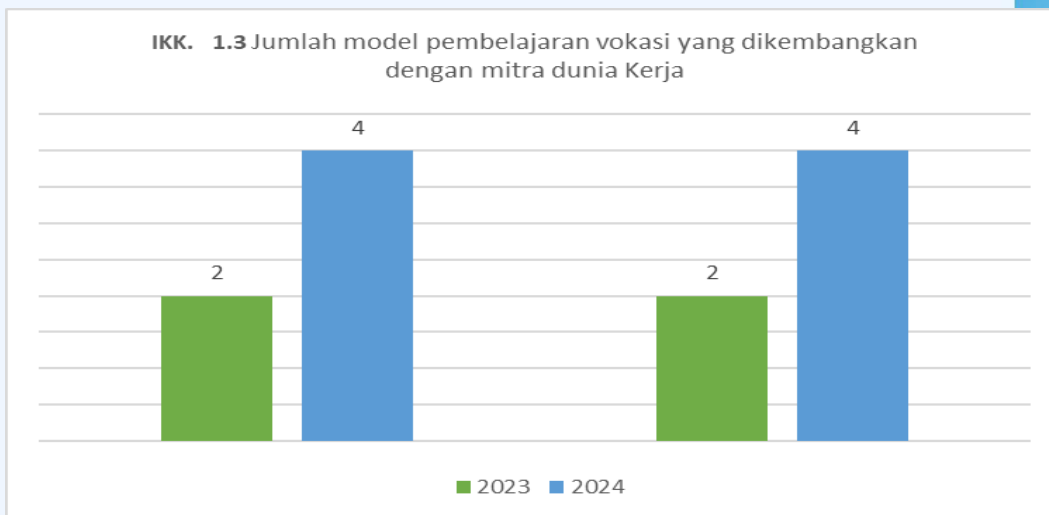
Model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja pada tahun 2023 targetnya adalah 4 Model :

Tabel 20 Perbandingan Realisasi IKK.1.3 Tahun Berjalan Dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA Kegiatan	2024			Akhir Renstra s.d 2024	
	Target	Real	%		
Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia Kerja	4	4	100	6	67%

Tabel 19 Perbandingan Realisasi IKK.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA Kegiatan	2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%
Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	2	2	100	4	4	100



Gambar 11 Grafik Perbandingan Target dan realisasi capaian output

Definisi Operasional

Program	: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SK	: Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Vokasi
IKK	: 2.6.4.4. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja
Definisi:	

Model adalah representatif yang akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan pijakan yang terpresentasikan dari model itu. Model juga dapat diartikan sebagai visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga model dapat berwujud sebagai: (1) tipe atau desain, (2) deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi, (3) deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner. Di samping itu juga model memiliki tujuan yang hendak dicapai dan memiliki prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapainya. Pengembangan model pendidikan vokasi adalah proses penelitian terapan yang merancang tipe, desain, bentuk deskripsi, sistem kegiatan, yang diproses dengan kaidah-kaidan penelitian ilmiah dan hasilnya dapat mewakili kondisi nyata yang diharapkan oleh kelompok sasaran dan mampu memecahkan masalah bidang

pendidikan vokasi. Untuk memperoleh hasil seperti itu, model program atau pembelajaran divalidasi oleh ahli dan praktisi dan diujicobakan sehingga model yang dihasilkan efektif, efisien, praktis dan menarik dalam memecahkan masalah atau dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja. Model yang dikembangkan dapat berbentuk model adaptasi dan model baru. Model adaptasi merupakan pengembangan model yang telah ada. Model baru merupakan model yang dikembangkan sendiri oleh pengembang.

Kriteria model/inovasi pembelajaran yang dimaksud antara lain: 1. Memperkuat Implementasi link and match Pendidikan Vokasi; 2. Memberikan solusi kemitraan dan penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi (SMK/PTV/LKP) dengan mitra dunia kerja; 3. Memiliki dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan vokasi; dan 4. Memiliki kemudahan direplikasi oleh Satuan Pendidikan Vokasi.

Model/inovasi pembelajaran dapat berupa:

1. Model Inovasi Pembelajaran Berbasis Proyek. Pembelajaran ini berorientasi pada proyek yang ada di industri dan disusun serta direncanakan bersama industri;
2. Pengembangan Teaching Factory. Model ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teaching factory di SMK;
3. Pengembangan Produk Kreatif. Model inovasi ini dilaksanakan untuk mengembangkan pembelajaran di SMK;
4. Pengembangan model diklat terapan bagi dosen/guru/instruktur vokasi;
5. Pengembangan diklat baru yang selaras dengan mitra dunia kerja;
6. MOOC (Massive Online Open Courses) untuk diklat bagi SDM pendidikan vokasi;
7. Pengembangan LMS (Learning Management System) pada SMK;
8. Model Pembelajaran Placement Berbasis Project. Placement adalah sebuah model pembelajaran kolaboratif yang berkelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran;

Pelaksanaan program pengembangan model pembelajaran vokasi tersebut mengacu pada juknis atau perdirjen terkait.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Satuan	:	Model
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai Besar Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Tabel 21 Capaian Kinerja dan Anggaran IKK 1.3

INDIKATOR KINERJA Kegiatan	2024			Akhir Renstra s.d		Anggaran		
	Target	Real	%	2024		Alokasi	Realisasi	%
Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia Kerja	4	4	100	6	67%	521,144,000	521,144,000	100

Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 1.3. dengan hasil yang sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, sebesar 100% atau 4 Model dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 4 Model. Capaian kinerja IKK 1.3. berkontribusi sebesar 67% pada pencapaian target Renstra (2024). Sedangkan untuk serapan anggaran 100% atau Rp. 521,144,000,- yang terserap dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 521,144,000,-.

Faktor Keberhasilan capaian ini didukung oleh :

Model pembelajaran yang dikembangkan adalah inovasi model pembelajaran PjBL dan inovasi model magang industri. Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa Langkah yang sudah dilakukan antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Model Inovasi Pembelajaran
2. Penyusunan Model Inovasi Pembelajaran dan Instrumen uji keterbacaan
3. Review Buku PjBL, Magang Industri dan Instrumen uji keterbacaan
4. Tindak lanjut hasil review dan Layout Buku PjBL dan Magang Industri
5. Uji Keterbacaan
6. Pengolahan dan Pembahasan hasil uji keterbacaan
7. Finalisasi Buku PJBL dan Magang Industri, Layout dan Pelaporan

8. Sosialisasi Model Inovasi ke Fungsional tertentu (Widyaiswara dan PTP)

Kendala / Permasalahan :

1. Terkendala rentang waktu yang singkat dalam penyusunan model 1. Koordinasi tatap muka dengan tim pengembang dikarenakan kesibukan yang lain
2. Koordinasi tatap muka dengan tim pengembang secara luring sulit dikarenakan kesibukan yang lain
3. Penentuan SMK yang dijadikan contoh praktik baik dan Pengumpulan data/informasi untuk praktik baik pjbl di SMK

Tindak Lanjut :

1. Melakukan koordinasi untuk menentukan rentang waktu dalam penyusunan model pembelajaran di Tahun yang akan datang
2. Tim pengembang melakukan koordinasi melalui Grup WA dan zoom meeting 45
3. Tim pengembang melakukan koordinasi via WA dan Zoom meeting ke SMK yang nanti ditindaklanjuti dengan visitasi Strategi : Melakukan jadwal pelaksanaan dengan melibatkan tim pengembang agar pelaksanaan dapat memungkinkan dengan kegiatan luring


[2.1]

Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata termasuk salah satu UPT yang telah mengimplementasikan SAKIP, dan sejak tahun 2020 telah mencantumkan perolehan predikat SAKIP dalam salah satu butir Perjanjian Kinerja.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan

kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah maka perlu dilakukan evaluasi kuantabilitas pada instansi pemerintah. Berdasarkan Lembar hasil evaluasi SAKIP Final yang sudah ditandatangani oleh Itjen Kemdikbudristek yang dilaksanakan melalui aplikasi Spasikita BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memperoleh nilai masuk dalam kategori "A" dengan penilaian SAKIP 87.25.



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pengembangan Penjaminan
Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan
Pariwisata
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20.5
Predikat		A	87.25

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

- Satker belum memiliki dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja sesuai dengan Renja T+1, DIPA, RKA, RAB, KAK/TOR.
- Satker telah melakukan revisi Renstra 2020-2024 sebanyak 3 kali namun bukan dikarenakan perubahan OTK dan amanat perundangan


B. Pengukuran Kinerja

- Pengumpulan data capaian kinerja berpedoman pada pedoman pengukuran kinerja, sedangkan Tata Cara pengumpulan data kinerja belum ada.
- Satuan kerja telah melakukan penataan pegawai di Internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, namun belum dilengkapi dengan Dokumen Analisis Beban Kerja ABK atau matriks peran hasil, Dokumen Peta Jabatan, Rencana Pengembangan Pegawai, Surat Keputusan Penataan Pegawai seperti rotasi dan promosi/demosi.
- Terdapat dokumen analisis pengukuran kinerja, namun belum terlihat adanya refocusing yaitu perubahan atas OTK atau struktur organisasi

C. Pelaporan Kinerja

- Ada penyesuaian kinerja sebagai hasil laporan kinerja secara berkala, namun belum secara spesifik tergambar pada RKA yang digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- Ada dokumen rapat pembahasan hasil/informasi laporan kinerja digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja namun belum secara spesifik tergambar pada RKA melalui perbandingan Informasi

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik derajatu Dokumen Elektronik derajatu hasil catatannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diupload secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS



pada laporan kinerja dengan dokumen program dan kegiatan tahun berjalan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Akuntabilitas Kinerja Internal, namun pendampingan belum memadai, seperti Evaluasi dilaksanakan secara sederhana dan terbatas yang diliputi dengan pembuktian dan pengujian lapangan, serta serta didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
- Satker telah memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, namun perlu didukung dengan dokumen namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Tahunan 1, 2, 3 dan 4.
- Satker telah memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Tahunan 1, 2, 3 dan 4.
- Satker telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja, namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Tahunan 1, 2, 3 dan 4.

Balai Besar

A. Perencanaan Kinerja

- Satker agar dapat mengikuti dengan Renja T+1, DIPA, RKA, RAB, KAK/TOR dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- Satker agar tidak terlalu banyak melakukan revisi jika tidak dikarenakan adanya perubahan OTK dan amanat perundangan dalam melakukan perencanaan yang lebih matang.

B. Pengukuran Kinerja

- Satker agar melengkapi dokumen Tatacara Pengumpulan Data Kinerja dalam rangka pengukuran kinerja sehingga dapat lebih terarah.
- Satker agar melengkapi data dukung berupa Dokumen Analisis Beban Kerja ABK atau matriks peran hasil, Dokumen Peta Jabatan, Rencana Pengembangan Pegawai, Surat Keputusan Penataan Pegawai seperti rotasi dan promosi/demosi dalam menyajikan informasi penataan pegawai di Internal organisasi.
- Satker agar menyajikan informasi refocusing atas perubahan OTK/organisasi dalam analisis pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja


- Satker agar secara spesifik mendeskripsikan pada RKA terkait penyesuaian kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- Satker agar secara spesifik menggambarkan pada RKA terkait perbandingan Informasi pada laporan kinerja dengan dokumen program dan kegiatan tahun berjalan

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal


- Satker agar melengkapi dengan pembuktian dan pengujian lapangan, serta didukung dengan bukti-bukti yang memadai dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara sederhana dan terbatas yang
- Satker agar melengkapi data dukung berupa dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja

Tahun 1, 2, 3 dan 4 pada pengujian dan pemanfaatan Hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Jakarta, 12 Desember 2024


 Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik derajatu Dokumen Elektronik derajatu hasil catatannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diupload secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS



Gambar 12 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

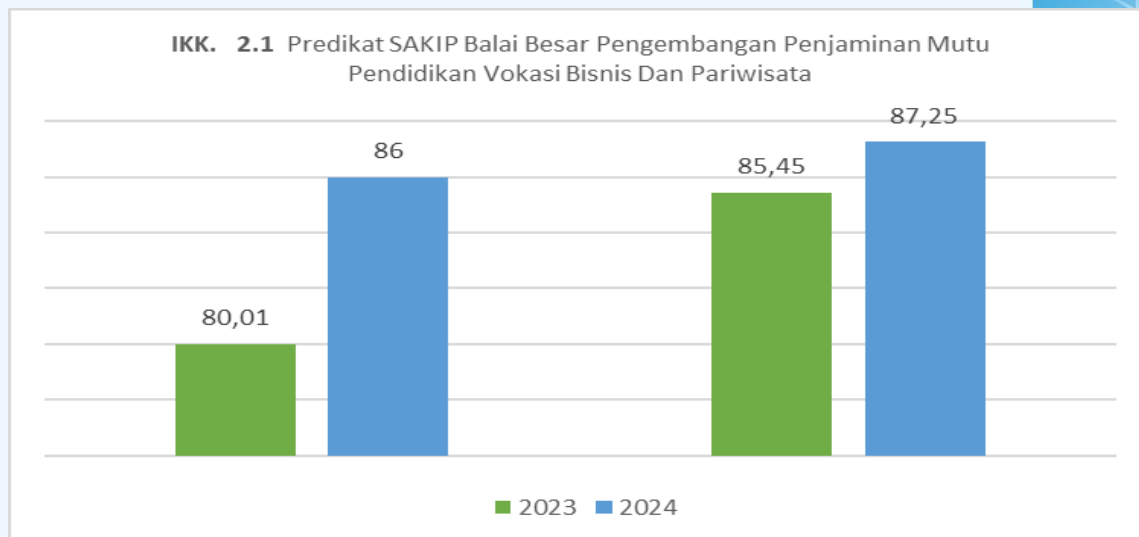
Definisi Operasional SAKIP :

Objective	: Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi	
Mengkoordinasikan dan mengendalikan pencapaian target-target transformasi pendidikan vokasi secara efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.		
Key Result 1	: Perencanaan dan Pengendalian Program, Anggaran, dan data.	
Indikator 1.1	: Capaian SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi A (86), dan capaian SAKIP Setditjen Diksi A (85).	
Definisi	Metode Perhitungan	
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).	<p>Nilai Sakip $(30\% \times \text{Perencanaan Kinerja}) + (30\% \times \text{Pengukuran Kinerja}) + (15\% \times \text{Pelaporan Kinerja}) + (25\% \times \text{Evaluasi Kinerja})$</p> <p>Konversi Nilai SAKIP > 90 - 100 = AA (Sangat Memuaskan) > 80 - 90 = A (Memuaskan) > 70 - 80 = BB (Sangat Baik) > 60 - 70 = B (Baik) > 50 - 60 = CC (Cukup) > 30 - 50 = C (Kurang) > 0 - 30 = D (Sangat Kurang)</p>	

Tabel 22 Capaian kinerja IKK 2.1 Predikat SAKIP BBPPMPV Bisnis Dan Pariwisata

2023			2024			Target Akhir Renstra	% Capaian target akhir renstra 2024
Target	Real	%	Target	Real	%		
80,01	85,45	107%	86	87,25	101%	A	100

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 2.1. dengan hasil yang sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, sebesar 101 % atau Nilai "A" dari target kinerja yang ditetapkan sebesar "A". Capaian kinerja IKK 2.1. berkontribusi sebesar 100% pada pencapaian target Renstra (2024). Capaian predikat A diinterpretasikan sebagai memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan akuntabel.



Gambar 13 Predikat SAKIP BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Faktor pendukung keberhasilan IKK ini adalah :

1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait seperti Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendapatkan bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan A dapat dicapai ataupun melebihi dari target yang ditentukan;
2. Rencana Strategis telah disusun berdasarkan Renstra eselon I dan Renstra Kemendikbud, serta direviu setiap tahun;
3. Perjanjian Kinerja minimal selaras dengan Renstra, Program Kerja, DIPA serta RKAKL;
4. Pengukuran Kinerja dilaksanakan secara regular, oleh Tim Evaluasi dan dikonfirmasi serta dilaporkan pada tim manajemen;
5. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen evaluasi serta evaluasi mandiri terkait penilaian SAKIP dengan maksimal berdasarkan kekurangan SAKIP sebelumnya;
6. Pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan
7. kegiatan dan dasar pengambilan keputusan berikutnya.

Kendala / Permasalahan :

1. Dokumen kelengkapan evaluasi sakip yang belum sesuai dengan kualitas penilaian;

Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait seperti Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendapatkan bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan A dapat tercapai dan hasil yang diperoleh sesuai target awal yakni nilai "A";
2. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen evaluasi sakin dan pendukung;
3. Melakukan evaluasi mandiri.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan studi banding ke pusat maupun UPT dibawah Ditjen Pendidikan Vokasi yang mempunyai kinerja dan nilai SAKIP yang memuaskan;
2. Terus berkoordinasi dengan Unit Utana dan Biro Perencanaan untuk mendapatkan asistensi terkait SAKIP

2. Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 berupa meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 2 Indikator tersebut, terdapat 1 indikator yang realisasinya sesuai dengan target dan 1 indikator yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut akan dijelaskan pada masing-masing indikator :

[2.2]**Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Balai**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi Spasikita Biro Perencanaan Kemdikbudristek dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kementerian Keuangan.

Capaian nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan penilaian berdasarkan :

1. Nilai EKA (50%) yang diambil dari evaluasi kinerja anggaran pada aplikasi SPASIKITA pada menu SIMPROKA dan,
2. Nilai IKPA (50%) yakni indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

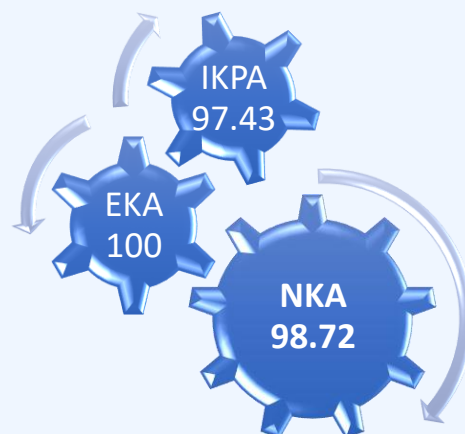
Definisi Operasional :

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengatur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran

Metode Perhitungan :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil perhitungan dari 50% Perencanaan Anggaran dan 50% Pelaksanaan Anggaran. Perencanaan Anggaran diukur dari hasil Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Pelaksanaan Anggaran diukur dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).



Gambar 14 Nilai Kinerja Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2024

Tahun 2024, pencapaian NKA BBPPMPV Bispar menempai urutan ke 3 (tiga) tertinggi dari total 7 (tujuh) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memperoleh nilai EKA sempurna, yaitu 100.

Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA)

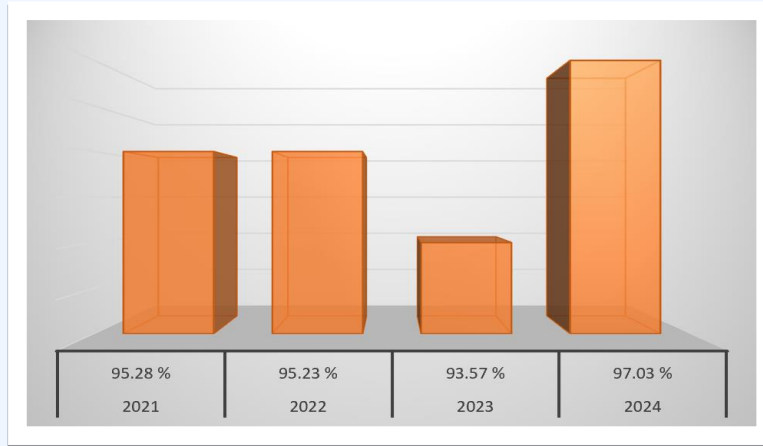
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Tahun 2024, nilai IKPA BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ada di angka 97.03.

Tabel 23 Penilaian IKPA Tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	023	352673	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA	Nilai	100.00	85.99	99.39	92.50	100.00	100.00	100.00	97.03	100%	0.00	97.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.90	19.88	9.25	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.00		97.97				100.00				

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa formulasi penilaian IKPA Tahun 2024 terdiri dari 7 variable dengan masing-masing bobot penilaian yang berbeda. Indikator Kinerja Anggaran tahun 2024 memiliki perbedaan dengan indikator tahun 2023. Perbedaan terletak pada formulasi penilaian dan bobot beberapa indikator. Pada tahun 2024, bobot penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA diubah dari 10% menjadi 15% serta formula penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menggunakan rata-rata tertimbang.

Tabel diatas adalah perbandingan nilai IKPA dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. IKPA



Gambar 15 Nilai IKPA Tahun 2021 – Tahun 2024

Tahun 2020 tidak dapat disajikan dikarenakan adanya perbedaan aplikasi yang tidak bisa akses.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran



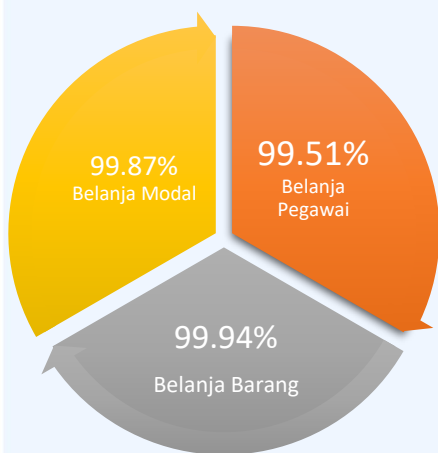
Pagu Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2024 awal adalah Rp 157.062.548.000. Di penghujung tahun 2024, melalui surat nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 Menteri Keuangan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pagu anggaran karena

dilakukan penyesuaian berupa Blokir AA yang dikecualikan/tidak diperhitungkan, sehingga Pagu Akhir Satker menjadi sebesar Rp. 155.063.599.000. Artinya pada Tahun 2024 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berhasil menyerap anggaran sebesar 99.87%.

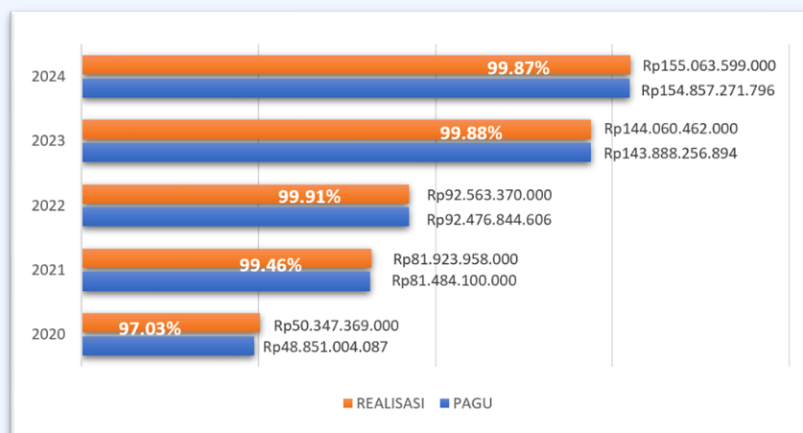
Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Awal	Blokir AA	Pagu Akhir	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp 24.413.708.000		Rp 24.413.708.000	Rp 24.293.619.694
Belanja Barang	Rp 119.977.252.000	Rp 1.998.949.000	Rp 117.978.303.000	Rp 119.907.378.276
Belanja Modal	Rp 12.671.588.000		Rp 12.671.588.000	Rp 12.655.222.826
Total	Rp 157.062.548.000		Rp 155.063.599.000	Rp 154.857.271.796

Sesuai dengan Tabel B.1 dapat dilihat bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengelola anggaran yang terdiri tiga (3) jenis belanja; Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berikut adalah presentase daya serap untuk masing-masing jenis Belanja.



Gambar 16 Presentase Daya Serap



Gambar 17 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024

Presentase realisasi anggaran sesuai Gambar 19 merupakan bukti nyata kemampuan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam mengelola anggaran. Dalam kurun waktu lima (5) tahun semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata selalu mengalami kenaikan jumlah Anggaran.

2. Catatan Penting DIPA

Catatan penting dipa adalah catatan berupa perjalanan Revisi DIPA yang terjadi pada satker. Revisi DIPA dapat dilakukan untuk beberapa hal, seperti: Menambah keluaran atau kegiatan baru, Mengatasi tunggakan tahun sebelumnya, Memperbaiki kesalahan administrasi, Memenuhi kebutuhan biaya operasional.

Tahun BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memiliki DIPA dengan dokumen nomor : SP DIPA-023.18.2.352673/2024, tanggal 24 Nopember 2023 dengan pagu sebesar Rp156,936,572,000.

Adapun rincian revisi DIPA yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Revisi 1 sampai dengan revisi 8 dengan besaran pagu tetap yaitu sebesar Rp156,936,572,000. Revisi merupakan revisi POK, Revisi Rencana Penarikan Dana (Revisi Halaman III DIPA) dan Revisi Buka Blokir.
2. Revisi 9 Tanggal 26 September 2024, dengan besaran pagu berkurang dari Rp156,936,572,000 menjadi Rp156,236,572,000 disebabkan :
 - a. Pengurangan pagu pada Belanja Pegawai sebesar Rp700,000,000 (Revisi Eselon 1 Ditjen Pendidikan Vokasi untuk menanggulangi kekurangan Belanja Pegawai pada Satker Eselon 1 Lainnya.)
 - b. Pada revisi 9 ini juga terdapat penambahan Output Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV) (4468.RBI) dengan pagu sebesar Rp3,801,725,000 dimana pagu anggarannya merupakan peralihan dari pagu belanja Modal Gedung dan Bangunan yang sebelumnya diblokir.
3. Revisi 10 dengan besaran pagu tetap yaitu sebesar Rp156,236,572,000. Terjadinya revisi karena adanya revisi POK, Revisi Rencana Penarikan Dana (Revisi Halaman III DIPA) dan Revisi Buka Blokir.
4. Revisi 11 dengan besaran pagu bertambah menjadi Rp157,352,548,000 merupakan revisi pagu PNPB dari semula Rp664.830.000,- menjadi Rp1.780.806.000,- (bertambah sebesar Rp1.115.976.000,-). Penambahan ini disebabkan adanya kontrak kerjasama yang baru dengan Dinas Provinsi Banten, Dinas Kota Tangerang, Dinas Propinsi Kaltara dan Dinas Propinsi Papua untuk pelaksanaan diklat Guru/Siswa dari Propinsi tersebut.

5. Revisi 12 sampai dengan revisi 14 dengan pagu tetap Rp157,352,548,000. Revisi merupakan revisi POK, Revisi Rencana Penarikan Dana (Revisi Halaman III DIPA).
6. Revisi 15 pagu berubah dari Rp157,352,548,000 menjadi Rp157,062,548,000 (berkurang sebesar Rp290,000,000 merupakan revisi belanja pegawai pada Satker Eselon I untuk menanggulangi Satker Eselon I lainnya mengalami kekurangan pada Belanja Pegawai.

3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2024 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melakukan efisiensi anggaran. Hasil efisiensi tersebut berasal pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Vokasi. Diantaranya merubah pola luring menjadi daring, efisiensi unit cost belanja barang, dan optimalisasi perjalanan dinas dan meeting. Dengan adanya ada efisiensi anggaran maka ada optimalisasi untuk menambah jumlah sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kejuruan Bidang Bisnis dan Pariwisata .

- a. Pada RO. 4468.SCI.002. Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri, ada efisiensi sebesar Rp. 204.865.000,- dengan melakukan kegiatan diklat reskilling tambahan di Lembaga dengan pola Pelatihan – Magang - Uji sertifikasi Industri – Penyelarasan Industri dengan Pola 130 Jp dengan sasaran 12 Orang.
- b. Pada RO. 4468.SCI.002. Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri, dengan alokasi yang sebesar Rp. 985.842.000,- ada efisiensi sebesar Rp. 91.862.000,- dengan melakukan kegiatan diklat daring dari 798 org mampu menambah sasaran menjadi 880 orang

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2024, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata melakukan inovasi:

1. Inovasi

1) Pengembangan aplikasi SIMPEDIK

SIMPEDIK merupakan Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Diklat BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yang mengakomodir:

- Layanan data sekolah guru dan MGMP Bidang Bisnis dan Pariwisata
- Layanan Diklat BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Pada Tahun 2024 SIMPEDIK terus dikembangkan dikembangkan bagi layanan data dan layanan diklat BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Untuk melihat aplikasi SIMPEDIK dapat mengunjungi:



Gambar 18 Aplikasi Simpedik

Sumber: <https://sim.bbppmpvbispar.kemdikbud.go.id>

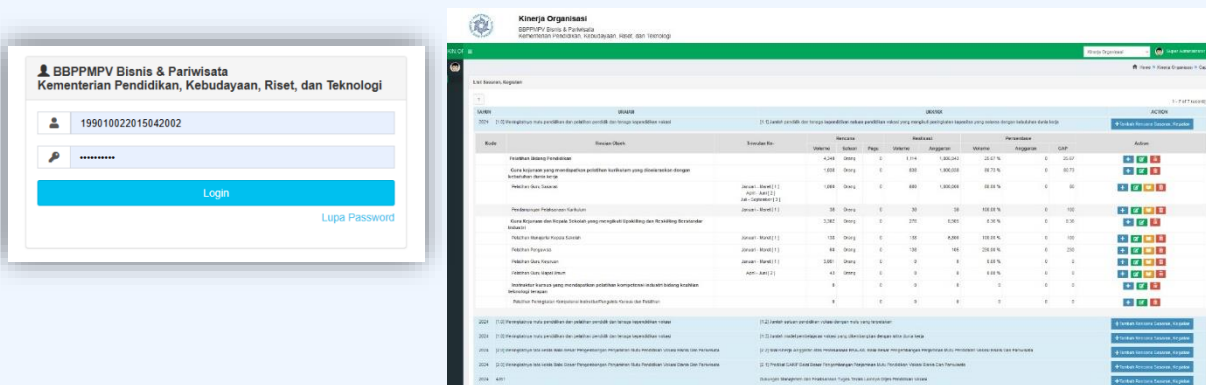
2) Aplikasi SIKEPEG

Aplikasi SIKEPEG merupakan aplikasi yang dibuat oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata yang berintegrasi dengan aplikasi DikbudHR dan kehadiran Biro SDM Kemendikbudristek.

Aplikasi SIKEPEG mengakomodir:

- Data kepegawaian;
- Data kehadiran;
- Data pelaksanaan kegiatan sertifikasi uji kompetensi yang diadakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata; serta
- Memantau pencapaian penggunaan anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Untuk melihat aplikasi SIKEPEG dapat mengunjungi:



Gambar 19 Aplikasi SiKepeg

Sumber: <https://sikepeg.id/>

2. Penghargaan

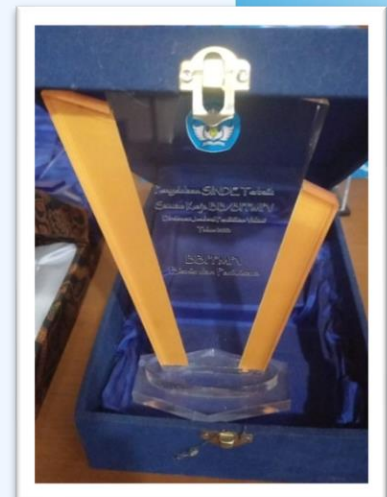
Pada tahun 2024, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata mendapatkan penghargaan, antara lain:



Gambar 20 Penghargaan Duta Merdeka Belajar



Gambar 22 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 21 Penghargaan Pengelolaan Sinde Terbaik

3. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2020-2024 yang masih berlaku, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata melakukan program *crosscutting/collaborative*

1. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA dan SMK Bidang Bimbingan Konseling
2. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA dan SMK Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila
3. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA dan SMK Mata Pelajaran
4. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA dan SMK Mata Pelajaran
5. Pelatihan Kewirausahaan bagi Guru SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten
6. Pelatihan Bahasa Inggris bagi Guru SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten

**MATRIK KEGIATAN CROSSCUTTING
BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA - TAHUN 2024**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LANDASAN CROSSCUTTING	UNIT PUSAT TERKAIT	UPT TERKAIT	CROSSCUTTING BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA	JUMLAH	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1	Pelatihan Bidang Pendidikan	1. Pelatihan Guru kejuruan	DIPA BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2024	Dijèn Vokasi	BBPPMPV Bispar	Teknis melaksanakan kegiatan Pelatihan <i>Upkilling</i> dan <i>Reskillin g</i> Berstandar Industri bagi Guru Kejuruan Bisnis dan Pariwisata, berkolaborasi dengan SMK yang menjadi Pusat Belajar (PB) dan Industri mitra PB yang akan menjadi tempat Magang diindustri bagi peserta pelatihan. PB mengasi guru bidang keahlian yang akan menjadi mentor berkolaborasi dengan fasilitator BBPPMPV Bispar sebagai pengajar pelatihan. Dilakukan penantangan Kespatakatan Bersama antara Pusat Belajar (PB), Industri Mitra dan diketahui oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	3061	Orang	Maret s.d September	Penanggungjawab Tim Kerja Penjaminan Mutu dan Fasilitas Peningkatan Kompetensi SDM Vokasi
2	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	1. Pelatihan Training of Trainers (ToT) Bagi Guru SMP di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Tangerang bekerpu 2. Pelatihan Pemanfaatan Akum Belajar.id bagi Pengawas Sekolah di Lingkungan 3. Pelatihan <i>Training of Trainers</i> (ToT) bagi Guru SD di Lingkungan 4. Pelatihan Perencanaan Berbasis Data bagi Pengawas Sekolah di Lingkungan 5. Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi bagi	1. Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM Kota Tangerang dengan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2. DIPA BKPSDM Kota Tangerang tahun 2024	BKPSDM Kota Tangerang	BBPPMPV Bispar dan BKPSDM Kota Tangerang	Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi berdasar kepada anggaran DIPA BKPSDM Kota Tangerang selaku pelaksana Kegiatan dan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata selaku penyedia Rancangan program, Fasilitator, dan Sarana Prasarana pelaksanaan kegiatan	210	Orang	7 hari	Kepala Bugan Tata Usaha BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
3	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	1. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jejang SMA dan SMK Bidang Bimbingan Konseling 2. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jejang SMA dan SMK Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila 3. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jejang SMA dan SMK Mata Pelajaran 4. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jejang SMA dan SMK Mata Pelajaran 5. Pelatihan Kewirausahaan bagi Guru SMA dan SMK di Lingkungan 6. Pelatihan Bahasa Inggris bagi Guru SMA dan SMK di Lingkungan	1. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2. DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Banten	a. Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi dengan berdasar kepada DIPA Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Banten. b. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menyediakan Rancangan program, Fasilitator, dan Sarana Prasarana selama pelaksanaan kegiatan	221	Orang	7 Hari	Penanggungjawab Tim Kerja Pengembangan Mutu, Inovasi, Kerjasama, data, Inovasi dan Website

BAB IV Penutup

Pada Tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Laporan kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. IKK 1.1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Target 4452 orang dengan capaian kinerja 4456 orang atau 100%. Alokasi anggaran Rp. 87,585,843,000,- dengan realisasi anggaran Rp. 87,573,578,314,- atau 99,99% hampir 100%.
2. IKK 1.2 Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan. Target 1412 lembaga dengan capaian kinerja 1412 lembaga atau 100%. Alokasi anggaran Rp. 8,479,176,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8,479,156,000,- atau hampir mencapai 100%.
3. IKK 1.3 Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja. Target kinerja 4 Model dengan capaian kinerja 4 Model atau 100%. Alokasi anggaran Rp. 521,144,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 521,144,000,- atau 100%.
4. IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata dengan target predikat A terealisasi capaian kinerja predikat A.
5. IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata. Target kinerja nilai NKA 96.59 realisasi capaian kinerja NKA 98.72.

Laporan Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun Anggaran 2024 ini merupakan perwujudan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholder dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Hingga akhir tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2024 kiranya menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja Tahun berikutnya. Realisasi kinerja Tahun 2025 kiranya tidak menurun dari capaian kinerja Tahun 2024 bahkan mungkin lebih meningkat, mengingat Tahun 2025 sasaran dan anggaran yang lebih banyak dibanding Tahun 2024;
2. Koordinasi internal antar unit terkait untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran;
3. Koordinasi yang baik antara Pusat dan Daerah serta seluruh stakeholder yang terlibat.
4. Perlu adanya perencanaan anggaran dan kegiatan yang baik untuk dapat menunjang ketercapaian kinerja dan anggaran dengan memanfaatkan efisiensi anggaran.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang dapat diusulkan baik bagi organisasi internal dan eksternal untuk Tahun akan datang untuk dilakukan antara lain :

1. Unit-unit terkait saling berkoordinasi secara regular dan saling berkomitmen pada rekomendasi-rekomendasi perbaikan baik ditingkat internal satuan kerja maupun tingkat eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan;
2. Bagi unit utama agar regulasi dapat disiapkan sebelum tahun berjalan agar pelaksanaan di tahun berjalan dapat direncanakan dengan baik untuk memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan dengan rentang waktu yang ideal;
3. Adanya upaya lebih memfokuskan pada pelatihan keterampilan (praktek) dengan para ahli di bidangnya karena siswa SMK hampir 70 % fokus kepada keterampilan, jika hanya fokus ke teori saja tidak akan memenuhi kemampuan siswa

sesuai dengan tuntutan DUDI;

4. Agar di perbanyak lagi pelatihan untuk guru, khususnya pelatihan pedagogik;
5. Revisi anggaran terkait perubahan kebijakan pada tingkat unit utama diharapkan dicermati agar dapat menunjang penilaian indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja di satker.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabli
Jabatan : Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yulianti
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Kiki Yulianti
NIP -

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Sabli
NIP 196405021993031002



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Arie Wibowo Khurniawan
Jabatan : Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Tatang Muttaqin
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Depok, 12 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Vokasi
Tatang Muttaqin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPPMPV Bisnis dan
Pariwisata
Arie Wibowo Khurniawan



Catatan :


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	4452
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	1412
	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	4
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	96.59

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 45.701.098.000
2	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp 111.651.450.000
Total Anggaran			Rp 157.352.548.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
 Vokasi
 Tatang Muttaqin

Depok, 12 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BBPPMPV Bisnis dan
 Pariwisata
 Arie Wibowo Khurniawan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	4
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	96.59

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 46.401.098.000,-
2.	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 110.535.474.000,-
Total Anggaran			Rp. 156.936.572.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Laporan Kinerja Triwulan 1
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452	Orang	86	94
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412	Lembaga	0	0
3.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	4	Model	0	0
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A	Predikat	-	-
5.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	96.59	Nilai	0	0



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi] IKK 1.1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

IKK ini didukung oleh beberapa rincian output antara lain :

1. RO SCI.001. Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja;
2. RO. SCI.002. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri;
3. RO.SCI.004. Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri.

Sasaran kinerja sesuai PK Tahun 2024 sebesar 4.452 orang dengan realisasi capaian kinerja pada triwulan I sebesar 94 orang dan adapun progres kegiatan pada Triwulan I atau selama Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret adalah

1. Rakor Reskilling dan Upskilling pada Tanggal 25 sd 27 Februari 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 250 Orang;
2. Penyusunan dan Finalisasi Modul;
3. Workshop Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Oleh Assesor Kompetensi LSP;
4. Pelatihan Upskilling dan Reskilling Bagi Guru Mapel Umum (Pelatihan Guru Bahasa Inggris SMK Berstandar Industri) Periode 19 s.d. 25 Februari 2024 dengan realisasi 44 orang guru bahasa Inggris SMK (2 kelas) Asal sekolah peserta SMK-PK (98%) SMK Non-PK (2%) dengan Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan;
5. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Bidang Keahlian Akuntansi dan Tata Kecantikan Periode 3 s.d. 9 Maret 2024 dengan realisasi 25 orang instruktur LKP Akuntansi dan 25 orang instruktur LKP Kecantikan terbagi atas 2 kelas;
6. Rakor Finalisasi Pemetaan Program Kampus Mengajar Ank.7 pada Tanggal 8 sd 10 Januari 2024.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala / Permasalahan :

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi :

1. Belum terbitnya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
2. Tidak adanya survey dalam penentuan SMK sebagai Pusat Belajar dan industri lokasi magang peserta
3. Penentuan Industri lokasi Magang Kegiatan reskilling dan upskilling yang telah bekerjasama dengan Pusat Belajar tidak sesuai dengan klaster yang akan dilaksanakan
4. Jaringan internet yang belum stabil dalam mengikuti Webinar series;
5. Ada Blokir AA sebesar Rp. 14.530.614.000,- .

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Pelaksanaan menyesuaikan daerah perwalian BBPPMPV Bispar (DKI & Kalimantan);
2. Peserta pengganti diambil dari data cadangan peserta yang daerahnya terjangkau secara jarak dan transportasi;
3. Pemutakhiran data melalui update data tiap LKP ataupun jaringan komunikasi dan databse pendukung lainnya;
4. Beberapa owner memberikan kesempatan kepada staf LKP yang lebih muda;
5. Berkoordinasi dengan Setditjen Pendidikan Vokasi terkait Bukbuka blokir AA dan menyiapkan data dukung buka blokir



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi] IKK 1.2 Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Progress / Kegiatan :

Pada IKK ini didukung Rincian Output (RO) QDB.001. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi. Sasaran kinerja pada IKK Ini sebanyak 1.412 Lembaga. IKK ini direncanakan baru akan tercapai pada Triwulan III dan IV. Adapun progres yang sudah dilakukan untuk menyiapkan ketercapaian IKK ini adalah : Merancang jadwal tahapan kegiatan PBD.

Kendala / Permasalahan :

1. Menunggu rilis Rapor Pendidikan yang terbaru di bulan Mei;
2. Juknis PBD dari pusat masih dalam proses penyusunan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan Pusat ;
2. Melakukan rakor setelah rilis terbatas Rapor Pendidikan terbaru

3. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi] IKK 1.3 Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Progress / Kegiatan :

1. Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan (BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan Mitras DUDI)
2. Menganalisis dan merancang kebutuhan inovasi pembelajaran



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



3. Sosialisasi Inovasi Pembelajaran ke SMK dan Fungsional Tertentu
4. SMK Melakukan Self Asemen 4 model (PjBL, Magang Industri, PPK, TeFa)

Kendala / Permasalahan :

1. Analisis Kebutuhan Inovasi Pembelajaran;
2. Pengisian Self Asesmen oleh SMK.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan koordinasi dengan Mitras DUDI untuk pedoman/panduan inobel
2. Melakukan koordinasi dengan SMK untuk melakukan pengisian Self Asesmen

4. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Progress / Kegiatan :

Capaian output IKK baru akan tercapai setelah Tahun Anggaran 2024 pada Tahun 2025 dengan hasil penilaian mandiri dari satuan kerja dengan bimbingan oleh biro perencanaan dengan validasi dan penilaian akhir oleh Inspektur Jenderal Kemendikbudristek meliputi beberapa komponen, antara lain :

1. Komponen Perencanaan
2. Komponen Pengukuran Kinerja
3. Komponen Pelaporan Kinerja



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



4. Komponen Evaluasi Kinerja.

Pendampingan dalam evaluasi mandiri Satker bersama-sama dengan Biro Perencanaan Kemdikbudristek, kemudian divalidasi oleh Inspektorat Jendral Kemdikbudristek untuk menghasilkan Nilai SAKIP Tahun 2024

Kendala / Permasalahan :

Dokumen kelengkapan evaluasi sakip Tahun 2024 belum maksimal dengan ketentuan yang berlaku dan kualitas yang dibutuhkan. Ada perubahan perubahan dan kelengkapan dokumen baru dalam dokumen pendukung SAKIP

Strategi / Tindak Lanjut :

Tim SAKIP akan berkoordinasi dengan unit-unit terkait didalam internal lembaga untuk merancang pemenuhan kebutuhan Dokumen SAKIP Tahun 2024 dan berkoordinasi dengan Unit Utama baik Setditjen Vokasi maupun Biro Perencanaan terkait Kelengkapan Dokumen SAKIP.

5. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Progress / Kegiatan :

Ketercapaian indikator kinerja ini baru akan tercapai pada akhir tahun dengan berakhirnya semua proses kegiatan. kegiatan- kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target ini adalah :

1. Melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mendorong nilai EKA seperti Bobot Penyerapan, Bobot Konsistensi, Bobot Capaian Rincian Output dan Bobot Efisiensi maupun penilaian IKPA
2. Melakukan evaluasi kinerja per trwiulan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala / Permasalahan :

Kendala yang dihadapi adalah Masih ada Pagu Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 18.332.339.000,- yang terdiri atas Belanja Barang Rp. 14.530.614.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.3.801.725.000,- menjadi beban serapan di akhir Tahun yang dapat mengganggu kinerja anggaran

Strategi / Tindak Lanjut :

Berkoordinasi dengan Unit Utama khususnya dan Biro Perencanaan agar dapat membuka Blokir Anggaran AA untuk memaksimalkan capaian kinerja anggaran Tahun 2024

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[352673.DL.4468.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Kajian	4	0	4	521.144.000	0	521.144.000
[352673.DL.4468.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	0	16	491.550.000	0	491.550.000
[352673.DL.4468.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	1.412	0	1.412	9.449.176.000	84.626.000	9.364.550.000
[352673.DL.4468.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran BBBPPMPV	Paket	1	0	1	12.671.588.000	0	12.671.588.000
[352673.DL.4468.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	1.038	0	1.038	5.192.374.000	314.472.044	4.877.901.956
[352673.DL.4468.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	3.302	43	3.259	81.391.849.000	10.451.469.000	70.940.380.000
	Orang	48	43	5	817.793.000	711.918.000	105.875.000



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



[352673.DL.4468.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan							
[352673.WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	2.316.053.000	443.193.000	1.872.860.000
[352673.WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	44.085.045.000	10.701.325.713	33.383.719.287
Total					156.936.572.000	22.707.003.757	134.229.568.243

D. Rekomendasi Pimpinan

-Mohon ditingkatkan lagi dengan Melihat Regulasi dan aturan yang berlaku, tetap melihat Target target capaian yang telah ditetapkan.

Depok, 30 Mei 2024

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sabli
NIP 196405021993031002



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Laporan Kinerja Triwulan 2
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan
Pariwisata Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progres Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452	Orang	1400	1380
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412	Lembaga	0	10
3.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	4	Model	0	0
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Pejaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	A	Predikat	-	-
5.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	96.59	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi Bisnis dan Pariwisata]

IKK 1.1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Telah terlaksana:

1. Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Angkatan 1, dilaksanakan 29 April s.d. 5 Mei 2024 secara luring di Redtop Hotel Jakarta dengan sasaran 60 Kepala Sekolah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan, semua peserta hadir
2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dilaksanakan 12 s.d. 18 Mei 2024 secara luring di Arosa Hotel Jakarta Selatan dengan sasaran 60 Pengawas Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan dan semua peserta hadir mengikuti Kegiatan.
3. Pelatihan Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri Guru Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Bisnis dan Pariwisata untuk Triwulan 2 sebanyak :
 - a. Angkatan 1 Periode 25 April s.d 7 Mei dengan sasaran 640 peserta Guru Vokasi Bisnis dan Pariwisata, yang hadir mengikuti kegiatan 629 peserta
 - b. Angkatan 2 Periode 29 April s.d 21 Juni 2024 dengan sasaran 640 Peserta Guru Vokasi Bisnis dan Pariwisata, yang hadir mengikuti Kegiatan sejumlah 631 Peserta.

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Upskilling Guru Vokasi Bisnis dan Pariwisata dilaksanakan secara Blended Learning dan Magang Industri.

Kendala / Permasalahan :

1. Hampir sebagian Kepala Sekolah berpindah tugas, purnabakti, dan sudah mengikuti kegiatan pelatihan ini ditahun lalu.
2. Database Pengawas SMK sangat terbatas, banyak yang sudah memasuki masa purna tugas.
3. Beberapa peserta mundur karena berbagai alasan
4. Beberapa peserta tidak direkomendasikan melanjutkan ke magang industri terkait ketuntasan pembelajaran daring dan tugas portofolio
5. Ada Blokir AA untuk Akun SCI 002 guru vokasi yang mengikuti magang industri

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Update data Kepala Sekolah melalui Disdik Provinsi
2. Bagi peserta yang mundur seizin kepala sekolah membuat surat bermaterai.
3. Surat akan diteruskan sebagai laporan ketidaktuntasan peserta kepada disdik provinsi terkait

**2. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi Bisnis dan Pariwisata]
IKK 1.2 Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan**

Progress / Kegiatan :

Pada Triwulan 2, belum terlaksana:

1. Sosialisasi dari Pusat mengenai Rapor Pendidikan bagi Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah versi 2.0 secara daring
2. Update refreshment materi PBD kepada Tim PBD Bispar, secara daring

Kendala / Permasalahan :

1. Belum adanya Juknis PBD dari Pusat, masih dalam proses penyusunan
2. Refreshment materi melalui daring, Tim PBD tidak fokus dalam menerima materi, dikarenakan ada kegiatan di waktu yang bersamaan

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan Pusat
2. Akan dilaksanakan Training of Trainer bagi Tim Pendampingan secara luring di triwulan III.

**3. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi]
IKK 1.3 Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja**

Progress / Kegiatan :

Pada Triwulan 2, Belum dilaksanakan:

1. Persiapan Penyusunan Model Inovasi Pembelajaran
2. Penyusunan Model Inovasi Pembelajaran dan Instrumen uji keterbacaan
3. Review Buku PjBL, Magang Industri dan Instrumen uji keterbacaan
4. Tindak lanjut hasil review dan Layout Buku PjBL dan Magang Industri
5. Uji Keterbacaan
6. Pengolahan dan Pembahasan hasil uji keterbacaan
7. Finalisasi Buku PJBL dan Magang Industri, Layout dan Pelaporan
8. Sosialisasi Model Inovasi ke Fungsional tertentu (Widyaiswara dan PTP)

Kendala / Permasalahan :

1. Koordinasi tatap muka dengan tim pengembang dikarenakan kesibukan yang lain
2. Penentuan SMK yang dijadikan contoh praktik baik dan . Pengumpulan data/informasi untuk praktik baik pjbl di SMK

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Tim pengembang melakukan koordinasi melalui Grup WA dan zoom meeting
2. Tim pengembang melakukan koordinasi via WA dan Zoom meeting ke SMK yang nanti ditindaklanjuti dengan visitasi

4. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata]

IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Pejaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

Progress / Kegiatan :

Telah terlaksana:

1. Rapat Pengukuran Kinerja Triwulan 2, melalui tahap pengumpulan data dari setiap Unit Kerja pelaksana, dilanjutkan dengan pertemuan seluruh anggota Tim SAKIP untuk memastikan keakuratan data.

Kendala / Permasalahan :

1. Pelaporan data kinerja melalui aplikasi SPASIKITA terhambat oleh adanya gangguan pada Pusat Data Nasional.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melaporkan Capaian Kinerja secara manual (melalui *Google Drive*)sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

5. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata]

IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.

Progress / Kegiatan :

Nilai IKPA hingga Triwulan 2 mencapai 93,73, Huruf Mutu A, atau berkatagori Sangat Baik, dengan rincian:

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan					
1	'088	'023	352673	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU	Nilai Bobot Nilai Akhir Nilai Aspek	100	88,55	98,28	100	100	100	83,15	93,73	100%	0	93,73
						10	15	20	10	10	10	25				
						10	13,28	19,66	10	10	10	20,79				
						94,28		99,57				83,15				

1. Melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mendorong nilai EKA seperti Bobot Penyerapan, Bobot Konsistensi, Bobot Capaian Rincian Output dan Bobot Efisiensi maupun penilaian IKPA
2. Melakukan evaluasi kinerja per triwulan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran

Kendala / Permasalahan :

1. Terdapat kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, diantaranya pada kelompok Belanja Barang dan Modal.
2. Belum dibukanya Blokir AA

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Merevisi Rencana Penarikan Dana pada kesempatan periode berikutnya, disesuaikan dengan perubahan jadwal yang ada.
2. Mengajukan usulan Pembukaan Blokir AA

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[352672.DL.4468.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Kajian	4	0	4	521.144.000	0	521.144.000
[352672.DL.4468.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	10	6	491,550,000	0	491,550,000

[352672.DL.4468.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	1412	0	1412	9.449.176.000	920.926.000	8.528.250.000
[352672.DL.4468.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran BBBPPMPV	Paket	1	0,3	0,7	8.869.863.000	2.688.290.550	6.181.572.450
[352672.DL.4468.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	1038	0	1038	5.192.374.000	686.542.044	4.505.831.956
[352672.DL.4468.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	3302	1380	1922	66.861.235.000	39.667.915.600	27.193.319.400
[352672.DL.4468.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	48	50	0	817,793,000	742,543,000	75,250,000
[352672.WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	2,316,053,000	443,193,000	1,872,860,000
[352672.WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	44,085,045,000	21,286,504,234	22,798,540,766
Total					138,604,233,000	66,435,914,428	72,168,318,572



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Balai Besar Pengembangan Penjaminan
Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan
Pariwisata
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi				
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452	Orang	2669	4282
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412	Lembaga	612	1307
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	4	Model	0	4
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A	Predikat	-	A
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	96.59	Nilai	0	82.29

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Angkatan 2 Dilaksanakan 19 s.d. 25 Agustus 2024 secara luring di Redtop Hotel Jakarta dengan jumlah 60 peserta, semua peserta hadir dan mengikuti kegiatan,
2. Pelatihan Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri Guru Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Bisnis dan Pariwisata Angkatan 5 Periode 17 September s.d 15 Oktober 2024 dengan jumlah peserta yang diundang sejumlah 580 peserta, yang hadir 568 peserta.
3. Pelatihan Komite Pembelajaran SMK Pusat Keunggulan Tahun 2024 wilayah Propinsi kalaimanytan dan DKI Jakarta • Tahap 1 periode 19 s.d. 30 Agustus 2024 sejumlah 5 kelas (130 orang) dilaksanakan secara daring dan LMS • Tahap 2 periode 26 Agustus s.d. 6 September 2024 Sejumlah 4 Kelas (100 peserta) dilakukan secara Daring melalui LMS dan dan Tatap muka Virtual.
4. Pelatihan Penyegaran Komite Pembelajaran SMK PK tahun 2022-2023 sejumlah 173 SMK PK (873 peserta terdiri dari wakkur, Guru Umum dan Guru PK) SMK PK dilaksanakan secara daring virtual tatap muka.

Kendala/Permasalahan

1. Hampir sebagian Kepala Sekolah berpindah tugas, purnabakti, dan sudah mengikuti kegiatan pelatihan ini ditahun lalu,
2. Beberapa peserta mundur karena berbagai alasan (PPG, Kesehatan, Keluarga, Pindah Satpen),
3. Beberapa Pengawas SMK banyak yang sudah purna tugas/menjelang purna tugas
Beberapa Pengawas membina ratusan SMK

Strategi/Tindak Lanjut

1. Update data Kepala Sekolah melalui Disdik Provinsi, Peserta dari SMKPK dan Non-PK
2. Bagi peserta yang mundur seizin kepala sekolah membuat surat bermaterai dan Surat akan diteruskan sebagai laporan ketidaktuntasan peserta kepada disdik provinsi terkait,
3. SMK-PK yang sudah pelatihan KP untuk segera melaksanakan IHT dan kegiatan SMKPK lainnya (Workshop, TEFA, RTL, dll)
PIP berkordinasi untuk melaksanakan pendampingan baik secara daring maupun luring

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Progress/Kegiatan

- 1.Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data, Asesemen Nasional dan Tracer Study untuk Satuan Pendidikan di 6 wilayah pendampingan BBPPMPV Bispar secara daring Propinsi Jakarta dan Kalimantan
- 2.Pendampingan Perencanaan Berbasis Data secara daring ke 1.307 SMK periode 20 - 30 September
- 3..Pendampingan/Supervisi PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi (6 Pemda dan 200 SMK September s.d. Oktober 2024
- 4.Pendampingan simulasi Asesmen Nasional di 5 SMK
- 5.Monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional di 20 SMK pada 6 wilayah pendampingan BBPPMPV Bispar
- 6.Pengisian Tracer Study pada tahun 2024 dibuka pada 15 Juli 2024, dengan sasaran alumni SMK lulusan tahun 2023
- 7.Berdasarkan cut off tanggal 19 September Jumlah SMK yang sudah mengisi sebanyak 1.228 (96.01%) dan jumlah lulusan yang sudah mengisi 107.703 alumni (75.89%
- 8.Advokasi Program Tracer Study tahun 2024 bagi SMK PK di wilayah 6 Pendampingan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada 3 September 2024 secara daring

Kendala/Permasalahan

1. Jaringan internet yang tidak stabil untuk SMK di area Kalimantan, sehingga pelaksanaan kegiatan secara daring tidak optimal
2. Beberapa satuan pendidikan yang masih terdata di Dapodik, namun sudah tutup atau hanya tinggal 1 kelas yang berjalan
3. Kurangnya motivasi beberapa sekolah swasta dalam mengikuti perencanaan berbasis data dan menganalisis rapor pendidikannya.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring, seperti sosialisasi juga direkam melalui Youtube BBPPMPV Bispar sehingga peserta bisa membuka rekaman sosiaslisasi kapanpun. Begitu juga dengan pendampingan daring PBD menggunakan Learning Management System, sehingga peserta bisa mempelajari materi-materi terkait Perencanaan Berbasis Data kapanpun.
2. Menginformasikan ke Dinas Pendidikan Provinsi terkait penutupan beberapa sekolah
3. Memotivasi sekolah-sekolah untuk tetap mengikuti kegiatan, dengan memberikan materi yang bisa diakses kapanpun

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Progress/Kegiatan

1. Workshop I Penyusunan Rancangan 4 Model Inovasi Belajar
2. Wawancara via zoom/gmeet (konfirmasi hasil TNA ke 12 calon sekolah sasaran)
3. Workshop II Penyusunan Rancangan 4 Model Inobel
4. Workshop III Penyusunan Rancangan 4 Model Inobel (Mengundang Mitras DUDI)
5. Pelaksanaan FGD Verifikasi hasil TNA Inobel ke 4 sekolah sasaran

Kendala/Permasalahan

1. Koordinasi tatap muka dengan tim pengembang dikarenakan kesibukan yang lain
2. Penentuan SMK yang dijadikan contoh praktik baik dan . Pengumpulan data/informasi untuk praktik baik pjb di SMK

Strategi/Tindak Lanjut

1. melakukan koordinasi melalui Grup WA dan zoom meeting
2. melakukan koordinasi via WA dan Zoom meeting ke SMK yang nanti ditindaklanjuti dengan visitasi

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Progress/Kegiatan

Predikat SAKIP BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, pada triwulan 3 sudah tahap Penilaian Mandiri yang dilaksanakan 2 sampai dengan 7 September 2024 dengan Nilai 87, saat ini sedang dalam proses penilaian oleh tim Penelaah dari Itjen dan Biro Perencanaan

Capaian baru bisa dihitung pada triwulan 4 ketika penilaian telah selesai dilaksanakan, dengan sumber data yang digunakan adalah Lembar Hasil Evaluasi (LHE).

Kendala/Permasalahan

Aplikasi Spasikita Mengalami dampak dari PDN sehingga satker bispar mengalami kesulitan dalam Pengumpulan Informasi dan data tahun sebelumnya



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun semua dokumen yang ditentukan dengan data data yang berdasarkan Laporan Kinerja tahun sebelumnya

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Progress/Kegiatan

1. Sampai Triwulan 3 BBPPMPV Bispar Memperoleh NKA 82,29
2. Mengusulkan Perubahan Komponen RO Belanja Modal yang Diblokir AA dari belanja Modal Sarana menjadi Belanja Prasarana

Kendala/Permasalahan

adanya Blokir AA untuk belanja Barang dan Modal sehingga agak terhambat untuk pelaksanaan Kegiatan Upskilling dan belanja Modal

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan usulan Buka Blokir AA berkoordinasi dengan Sesditjen Pendidikan Vokasi

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4468.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Kajian	4	4	0	Rp521.144.000	Rp521.144.000	Rp0



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4468.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	16	0	Rp491.550.000	Rp394.750.000	Rp96.800.000
[DL.4468.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	1412	941	471	Rp9.449.176.000	Rp6.222.751.000	Rp3.226.425.000
[DL.4468.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	1	1	0	Rp8.869.863.000	Rp6.873.907.250	Rp1.995.955.750
[DL.4468.RBI.001] Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	unit	1	0	1	Rp3.801.725.000	Rp683.600.171	Rp3.118.124.829
[DL.4468.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	1038	630	408	Rp5.192.374.000	Rp1.811.679.044	Rp3.380.694.956
[DL.4468.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	3302	2121	1181	Rp81.391.849.000	Rp68.973.384.600	Rp12.418.464.400
[DL.4468.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	48	50	0	Rp817.793.000	Rp742.543.000	Rp75.250.000
[WA.4261.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp2.306.053.000	Rp1.340.085.000	Rp965.968.000
[WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp43.385.045.000	Rp34.429.243.952	Rp8.955.801.048
Total Anggaran					Rp156.236.572.000	Rp121.993.088.017	Rp34.243.483.983

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Selalu update data Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah wilayah Binaan Propinsi Kalimantan dan DKI Jakarta agar data dan Informasi Kepala Sekolah dan Pengawas selalu terkini hingga dalam pemanggilan peserta tepat sasaran dan masih aktif .
2. Membuat daftar peserta cadangan atau pengganti untukantisipasi peserta upskilling yang tidak hadir



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

3. Hitung dengan tepat untuk peserta Upskilling yang sudah terdaftar tapi tidak dapat mengikuti kegiatan upskilling dari Angkatan 1 s.d 5 , buat kelas sesuai jumlah peserta yang tidak dapat mengikuti di jadwalkan pelaksanaan di Triwulan 4, agar target capaian output PK dapat tercapai.

3. Untuk segera melaksanakan kegiatan yang belum tercapai targetnya dan sudah ditargetkan di Triwulan 4

4. Lakukan Revisi untuk meningkatkan volume capaian jika memungkinkan.

Depok, 31 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Arie Wibowo Khurniawan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Balai Besar Pengembangan Penjaminan
Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan
Pariwisata
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi				
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452	Orang	4452	4456
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412	Lembaga	1412	1412
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	4	Model	4	4
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A	Predikat	A	A
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	96.59	Nilai	96.59	98.60

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pada IKK 1.1 di TW 4 ini untuk kegiatan peningkatan kapasitas PTK yang selaras dengan dunia kerja upskilling dan reskilling sudah mencapai target bahkan untuk Guru yang mengikuti upskilling di TW 4 ini terlaksana upskilling guru jurusan Tatakecantikan, UPW dan Caregiver sejumlah 60 peserta yang dilaksanakan tanggal 17 s.d 23 Nopember 2024 , Pelatihan kepemimpinan Kepala sekolah SMK wilayah kalimantan dan DKI Jakarta sebanyak 37 peserta. juga terlaksana kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru,Dosen dan Instruktur LKP bidang tataboga bekerja sama dengan Perancis Training of training escofier sejumlah 48 peserta selama 7 minggu tanggal 4 oktober - 22 nopemeber 2024 dan terlaksana juga kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru Tata Boga pada 5 destinasi Pariwisata superprioritas yang dilaksanakan Angkatan 1 3 kelas tanggal 1-7 Desember 2024 dan angkatan 2 sebanyak 2 kelas dari tanggal 8 - 14 Desember 2024 jumlah seluruh peserta sebanyak 100 Peserta.

Kendala/Permasalahan

adanya Blokir AA dan self Bloking menjadi kendala pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan di TW 4

Strategi/Tindak Lanjut

untuk perjadiin yang terkena self bloking diharapkan untuk tidak masuk dalam perhitungan kinerja dan penyerapan anggaran

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pada IKK 1.2 di TW 4 ini sudah terlaksana semua sasaran capaian baik secara daring dan pendampingan secara luring dan juga dilaksanakan penjaminan mutu ke SMK yang sudah mendapat pendampingan.

Kendala/Permasalahan

Banyak SMK yang sudah mendapat Pendampingan PBD

Strategi/Tindak Lanjut

diperlukan pembaruan model pendampingan PBD

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Progress/Kegiatan

Pada IKK 1.3 Model Pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan dunia kerja di TW 4 ini telah dilaksanakan sosialisasi kepada 400 lembaga/SMK yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 melalui daring Zoom

Kendala/Permasalahan

pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi dilaksanakan TW 3 dan TW 4 dikarena junkins dari pusat baru didapt di semester 2



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

pelaksanaan pengembangan model pembelajaran dapat dilaksanakan di semester 1 dengan juknis yang sudah tersedia

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Progress/Kegiatan

Pada Tw 4 ini nilai sakip 87.5 dengan predikat A

Kendala/Permasalahan

Pengumpulan data perlu diamksimalkan

Strategi/Tindak Lanjut

Membuat Aplikasi sederhana yang dapat mengumpulkan data pencapaian kinerja

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Progress/Kegiatan

Nilai kinerja anggaran sampai TW 4 ini 98.60

Kendala/Permasalahan

Adanya blokir AA dan Selfbloking yang mengakibatkan nilai kinerja tidak bisa maksimal

Strategi/Tindak Lanjut

berkoordinasi dengan eselon 1 terkait anggaran perjadiin yang selfbloking untuk tidak masuk dalam penilaian kinerja sehingga nilai NKA dapat maksimal

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4468.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Kajian	4	4	0	Rp521.144.000	Rp521.144.000	Rp0
[DL.4468.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	16	0	Rp491.550.000	Rp394.750.000	Rp96.800.000
[DL.4468.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	1412	1412	0	Rp9.449.176.000	Rp8.479.156.000	Rp970.020.000
[DL.4468.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	1	1	0	Rp8.869.863.000	Rp8.869.332.250	Rp530.750
[DL.4468.RBI.001] Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	unit	1	1	0	Rp3.801.725.000	Rp3.785.890.576	Rp15.834.424



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4468.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	1038	1038	0	Rp5.192.374.000	Rp4.695.121.044	Rp497.252.956
[DL.4468.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	3302	3366	0	Rp82.507.825.000	Rp82.135.914.270	Rp371.910.730
[DL.4468.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	48	50	0	Rp817.793.000	Rp742.543.000	Rp75.250.000
[WA.4261.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0
[WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp2.306.053.000	Rp2.306.053.000	Rp0
[WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp43.095.045.000	Rp42.917.367.656	Rp177.677.344
Total Anggaran					Rp157.062.548.000	Rp154.857.271.796	Rp2.205.276.204

D. Rekomendasi Pimpinan

1. untuk di tahun 2025 kegiatan yang bisa dilakukan dari awal tahun segera dilaksanakan, koordinasi dengan eselon 1 terkait juknis dan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan,
2. Maksimalkan Teknologi dalam Pengumpulan data laporan capaian kinerja
3. berkoordinasi dengan eselon 1 dan Biro perencanaan terkait self blocking perjadi terkait pengaruhnya terhadap penilaian kinerja apakah mempengaruhi atau tidak dalam nilai kinerja anggaran satker, agar hasil nilai kinerja satker dapat maksimal

Depok, 31 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
 Arie Wibowo Khurniawan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pengembangan Penjaminan
Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan
Pariwisata
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20.5
Predikat		A	87.25

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

1. Satker belum memiliki dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja sesuai dengan Renja T+1, DIPA, RKA, RAB, KAK/TOR.
2. Satker telah melakukan revisi Renstra 2020-2024 sebanyak 3 kali namun bukan dikarenakan perubahan OTK dan amanat perundangan

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengumpulan data capaian kinerja berpedoman pada pedoman pengukuran kinerja, sedangkan Tata Cara pengumpulan data kinerja belum ada.
2. Satuan kerja telah melakukan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, namun belum dilengkapi dengan Dokumen Analisis Beban Kerja ABK atau matriks peran hasil, Dokumen Peta Jabatan, Rencana Pengembangan Pegawai, Surat Keputusan Penataan Pegawai seperti rotasi dan promosi/demosi.
3. Terdapat dokumen analisis pengukuran kinerja, namun belum terlihat adanya refocusing yaitu: perubahan atas OTK atau struktur organisasi

C. Pelaporan Kinerja

1. Ada penyesuaian kinerja sebagai hasil laporan kinerja secara berkala, namun belum secara spesifik tergambar pada RKA yang digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
2. Ada dokumen rapat pembahasan hasil/informasi laporan kinerja digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja namun belum secara spesifik tergambar pada RKA melalui perbandingan informasi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

pada laporan kinerja dengan dokumen program dan kegiatan tahun berjalan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Akuntabilitas Kinerja Internal, namun pendalaman nya belum memadai, seperti Evaluasi dilaksanakan secara sederhana dan terbatas yang dilengkapi dengan pembuktian dan pengujian lapangan, serta serta didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
2. Satker telah memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, namun perlu didukung dengan dokumen namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Triwulan 1, 2, 3 dan 4.
3. Satker telah memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Triwulan 1, 2, 3 dan 4
4. Satker telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja, namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Triwulan 1, 2, 3 dan 4

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

1. Satker agar dapat melengkapi dengan Renja T+1, DIPA, RKA, RAB, KAK/TOR dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
2. Satker agar tidak terlalu banyak melakukan revisi jika tidak dikarenakan adanya perubahan OTK dan amanat perundangan dalam melakukan perencanaan yang lebih matang.

B. Pengukuran Kinerja

1. Satker agar melengkapi dokumen Tatacara Pengumpulan Data Kinerja dalam rangka pengukuran kinerja sehingga dapat lebih terarah.
2. Satker agar melengkapi data dukung berupa Dokumen Analisis Beban Kerja ABK atau matriks peran hasil, Dokumen Peta Jabatan, Rencana Pengembangan Pegawai, Surat Keputusan Penataan Pegawai seperti rotasi dan promosi/demosi dalam menyajikan informasi penataan pegawai di internal organisasi.
3. Satker agar menyajikan informasi refocusing atas perubahan OTK/organisasi dalam analisis pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Satker agar secara spesifik mendeskripsikan pada RKA terkait penyesuaian kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
2. Satker agar secara spesifik menggambarkan pada RKA terkait perbandingan informasi pada laporan kinerja dengan dokumen program dan kegiatan tahun berjalan

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Satker agar melengkapi dengan pembuktian dan pengujian lapangan, serta didukung dengan bukti-bukti yang memadai dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara sederhana dan terbatas yang
2. Satker agar melengkapi data dukung berupa dokumen Laporan Monitoring Evaluasi (Monev) Kinerja



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Triwulan 1, 2, 3 dan 4 pada penyajian dan pemanfaatan Hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Jakarta, 10 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur IV

Subiyantoro



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah
Direviu
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan
Pariwisata
Tahun Anggaran
2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Depok, 28 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Nahang Rukmana



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH**

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

2024



[bppmpvbispar.kemdikbud](https://www.facebook.com/bppmpvbispar.kemdikbud)



[bppmpvbispar](https://www.tiktok.com/@bppmpvbispar)



[bppmpv_bispar](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[bppmpv bisnis dan pariwisata](https://www.linkedin.com/company/bppmpv-bisnis-dan-pariwisata)



[0878 8989 2223](https://wa.me/087889892223)
(chat only)

bppmpvbispar.kemdikbud.go.id